

Titin Syamsuddin



PERUBAHAN PENERAPAN HUKUM  
PUTUSAN KASUS SYIQAQ, KHULUK, DAN LI'AN  
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
SE-PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006-2009

Titin Syamsuddin

PERUBAHAN PENERAPAN HUKUM PUTUSAN KASUS SYIQAQ, KHULUK, DAN LI'AN DALAM  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SE-PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006-2009



2017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



2017

**PERUBAHAN PENERAPAN HUKUM PUTUSAN KASUS  
*SYIQAQ*, *KHULUK*, DAN *LI'AN* DALAM PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SE-PROVINSI  
GORONTALO TAHUN 2006-2009**



**Oleh:  
Titin Syamsuddin  
NIM. 06.31.524/S3**

**DISERTASI**

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Doktor  
dalam Bidang Ilmu Agama Islam**

**YOGYAKARTA**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: <http://pps.uin-suka.ac.id>

## PENGESAHAN

Disertasi berjudul : **PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SE-  
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006 - 2009 (Studi Putusan Kasus  
*Syiqaq, Khuluk, dan Li'an*)**

Ditulis oleh : Titin Samsudin, S.Ag. M.HI.

NIM : 06.31.524/S3

**Telah dapat diterima  
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor  
dalam Bidang Ilmu Agama Islam**

Yogyakarta, 21 April 2017

Rektor  
Ketua Sidang,



Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19610401 198803 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**YUDISIUM**

**BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM**

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL **18 JULI 2016**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDA, **TITIN SAMSUDIN, S.Ag., M.HI.** NOMOR INDUK MAHASISWA **06.31.524/S3** LAHIR DI **GORONTALO** TANGGAL **11 MARET 1972**,

**LULUS DENGAN PREDIKAT :**

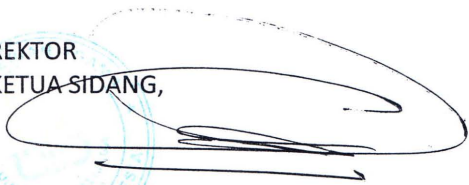
**PUIAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / ~~MEMUASKAN~~\***

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI KEISLAMAN DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

**SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 556**

YOGYAKARTA, 21 APRIL 2017

REKTOR  
KETUA SIDANG,

  
**PROF. DRS. KH. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.**  
**NIP. 19610401 198803 1 002**

\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DEWAN PENGUJI**  
**UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Disertasi berjudul : **PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SE-  
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006 - 2009 (Studi Putusan Kasus  
Syiqaaq, Khuluk, dan Li'an)**

Nama Promovendus : Titin Samsudin, S.Ag. M.HI.  
N I M : 06.31.524/S3

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

Sekretaris Sidang : Dr. H. Waryono, M.Ag.

Anggota : 1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.  
(Promoto/Penguji)

2. Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.  
(Promoto/Penguji)

3. Dr. Samsul Hadi, M.Ag.  
(Penguji)

4. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.  
(Penguji)

5. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
(Penguji)

6. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.  
(Penguji)

Diujikan di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017

Pukul 14.00 s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) .....

Predikat Kelulusan : Pujian (Cum Laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Titin Samsudin, S.Ag. M.HI.  
N I M : 06.31.524/S3  
Program/Prodi. : Doktor (S3) Studi Islam  
Konsentrasi : Studi Islam

menyatakan bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2017

Saya yang menyatakan,



Titin Samsudin, S.Ag. M.H.I.  
NIM. 06.31.524/S3



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**PASCASARJANA**

**PENGESAHAN PROMOTOR**

Promotor : Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. (

Promotor : Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA..

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA  
SE-PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006-2009  
(Studi Putusan Kasus *Syiqaq*, *Khuluk*, dan *Li'an*)**

yang ditulis oleh:

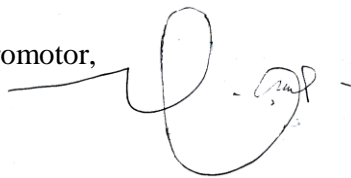
N a m a	:	Titin Samsudin, S.Ag. M.HI.
N I M	:	06.31.524/S3
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) Studi Islam
Konsentrasi	:	Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 18 Juli 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Januari 2017

Promotor,



Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA  
SE-PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006-2009  
(Studi Putusan Kasus *Syiqaq*, *Khuluk*, dan *Li'an*)**

yang ditulis oleh:

N a m a	:	Titin Samsudin, S.Ag. M.HI.
N I M	:	06.31.524/S3
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) Studi Islam
Konsentrasi	:	Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 18 Juli 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Januari 2017

Promotor,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA  
SE-PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006-2009  
(Studi Putusan Kasus *Syiqaq*, *Khuluk*, dan *Li'an*)**

yang ditulis oleh:

N a m a	:	Titin Samsudin, S.Ag. M.HI.
N I M	:	06.31.524/S3
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) Studi Islam
Konsentrasi	:	Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 18 Juli 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Januari 2017

Penguji,



Dr. Syamsul Hadi, M.Ag.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA  
SE-PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006-2009  
(Studi Putusan Kasus *Syiqaq*, *Khuluk*, dan *Li'an*)**

yang ditulis oleh:

N a m a	:	Titin Samsudin, S.Ag. M.HI.
N I M	:	06.31.524/S3
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) Studi Islam
Konsentrasi	:	Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 18 Juli 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Januari 2017

Penguji,

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA  
SE-PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006-2009  
(Studi Putusan Kasus *Syiqaq*, *Khuluk*, dan *Li'an*)**

yang ditulis oleh:

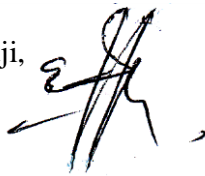
N a m a	:	Titin Samsudin, S.Ag. M.HI.
N I M	:	06.31.524/S3
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) Studi Islam
Konsentrasi	:	Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 18 Juli 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Januari 2017

Penguji,



Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.

## ABSTRAK

Kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* merupakan kasus khusus (hukum *syar'i*) yang terakomodasi dalam UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan tersebut merupakan dasar penyelesaian perkara perceraian bagi umat Islam. Namun, di Peradilan Agama se-Provinsi Gorontalo penerapan hukumnya tidak demikian. Ketiga kasus khusus (preskriptif *syar'i*) tersebut dialihkan menjadi kasus biasa (cerai talak dan cerai gugat). Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah mengapa terjadi perubahan penerapan hukum dalam putusan kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo?. Dengan rumusan masalah berikut: (1) bagaimana kedudukan hukum dan karakteristik perceraian *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*?; (2) bagaimana penerapan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama se-wilayah Provinsi Gorontalo?; (3) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terjadinya perubahan penerapan hukum perceraian *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dalam putusan hakim?

Penulisan disertasi ini menggunakan metode sebagai berikut; Jenis penelitian adalah kajian kepustakaan (*library research*), pendekatan yuridis-sosiolegal. Dalam penelitian digunakan tiga tataran teori yaitu penemuan hukum sebagai *grand theory*, *sociological jurisprudence* sebagai *middle range theory* dan teori perubahan penerapan hukum dari Ibnu Qayyim sebagai *applied theory*. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengambilan data sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis isi (*content*).

Hasil temuan penelitian adalah; 1) Kedudukan hukum perceraian *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dari doktrin fikih atau terkodifikasi dalam mazhab fikih (*law in the books*) berdasarkan yuridis formal telah menjadi hukum positif, terakomodir dalam UUPA No.7/1989 dan KHI (*law in action*). Ketiga kasus tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan kasus cerai talak dan cerai gugat pada umumnya (biasa). 2) Penerapan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*, hakim berpegang pada teks undang-undang (*legal formal*). Ketika tidak menemukan hukumnya, hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum. Hal ini menimbulkan perubahan penerapan hukum ketiga kasus tersebut. Dalam penerapan ketiga



kasus ini, pola penalaran hukum hakim tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, akan tetapi juga memperhatikan pencapaian nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan. 3). Perubahan penerapan hukum kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* berdasarkan hasil analisis pola penalaran hukum hakim menunjukkan penerapan ketiga kasus tersebut tidak memenuhi kepastian, kemanfaatan dan nilai keadilan, hal ini dipengaruhi oleh dua faktor: *Pertama*, faktor eksternal. Faktor ini dilihat dari lingkup *social* suatu perkara berupa keadaan, waktu, dan motivasi. Di samping itu faktor legalitas formal atau peraturan perundang-undangan perkawinan itu sendiri telah berperan aktif dalam mengubah ketiga kasus tersebut dengan menggeser nilai-nilai fikih klasik ke nilai-nilai baru. *Kedua*, faktor internal. Faktor tersebut dilihat dari hakim dalam melaksanakan tugasnya yaitu, berupa jaminan kebebasan peradilan/hakim, profesionalisme dan penghayatan etika profesi, apabila faktor-faktor tersebut terpatri dalam diri hakim, maka hakim dapat menghasilkan hukum baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam (*living law*) pada masa kini. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut telah optimal dimiliki oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama se-Provinsi Gorontalo, baiknya dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti merekomendasikan metode ***kausalitas-reaktualitas*** sebagai metode perubahan penerapan hukum terhadap tiga kasus yang dianalisis. Kausalitas merupakan proses berpikir dengan menggunakan hukum sebab akibat, baik secara formil, materiil, maupun natural. Penalaran ini digunakan dalam proses *konstatirng* dan *konstituiring*. Kemudian, dalam hal melakukan perubahan hukum, hakim dituntut harus reaktualitas. Artinya, hakim harus memerhatikan konteks sosial ketika menghadapi kasus kongkret preskripsi syar'i (*syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*) sebab konteks sosial tersebut sarat dengan muatan waktu, ruang, keadaan, motivasi, dan tradisi masyarakat muslim. Dengan cara demikian, nilai-nilai syar'i dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai kemodernan.

Kata Kunci; Perubahan, Penerapan Hukum, Putusan, Kasus *Syiqaq*, *Khuluk*, *Li'an*.

## ABSTRACT

The cases of *syiqaq*, *khuluk*, and *li'an* are a special case (*shar'* for Islamic law) accommodated in Law No.7/1989 on Religious Courts (UUPA) and Islamic Law Compilation (KHI). Those laws are the basis for the settlement of divorce for Muslims. However, in the Religious Courts throughout Gorontalo Province, the application of the laws has its uniqueness. The three special cases (*shar'* prescriptive) are transferred into a regular case (*taluuq* divorce and divorce by litigation). Based on this background, the problem of this research concerns on the changing application of *syiqaq*, *khuluk* and *li'an* laws on a divorce case in the Religious Courts throughout Gorontalo Province. Therefore, this study aims to seek out the answers on the legal position and characteristics of *syiqaq*, *khuluk*, and *li'an* divorce cases; (2) the application of *syiqaq*, *khuluk*, and *li'an* laws in a divorce court decision in the Religious Courts throughout Gorontalo Province; (3) the factors that affect the changing application of *syiqaq*, *khuluk*, and *li'an* divorce laws in the judge's decision.

This was a library research with a juridical-sociolegal approach. Three levels of theory are used, ie, legal discovery as a grand theory, sociological jurisprudence as a middle range theory and the theory of application change of Ibn Qayyim's applied theory. The source of research data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. The sample data retrieval is done by using purposive sampling. The analysis of data uses qualitative and content analysis.

This study obtains three findings. 1) The position of those three divorce laws of the *fiqh* doctrine or codified in Law Schools (law in the books) is based on a formal juridical that has become positive law, accommodated in the Law No. 7/1989 and KHI (law in action). All three cases have different characteristics with cases of *taluuq* divorce and divorce by litigation. 2) In the application of those three laws, judges are adhering to the text of the law (formal legal). When they do not find the law, they perform legal discovery (*rechtsvinding*) by using the method of law interpretation and construction. This has led to a change of law enforcement of the three cases in which the pattern of the legal reasoning of judges not only emphasizes the rule of law, but also pays attention to the achievement of the values of usefulness and fairness. 3) The changes in the application of those three laws based on the analysis of

patterns of legal reasoning of the judge show that the application does not meet certainty, usefulness and value of justice. It is influenced by two factors, ie, the external and internal factors. The external factors are seen from the social sphere of a case in the form of state, time, and motivation. In addition, the factors of formal legality or the laws of marriage have played an active role in changing the three cases by shifting the values of classical *fiqh* to the new values. The second factors are the internal factors which are viewed from the judges in performing their duties, ie, in the form of guarantees of freedom of the judiciary/judges, professionalism and appreciation of professional ethics. If these factors are embedded in the judges, they can ultimately generate new laws in accordance with the principles and values of Islam (living law) in the present. To determine whether these factors have optimally been owned by the judges in the Religious Courts throughout Gorontalo Province needs further research.

Based on the research findings, the researcher recommends re-actuality-causality method as a method of changing the legal implementation of the three cases analyzed. Causality is the thinking process by using the law of causation, either formally, materially, as well as naturally. This reasoning is used in the process of *constatiring* and *constituiring*. In terms of making changes for the laws, judges are required to do re-actuality. This means that judges should pay attention to the social context when facing *shar'ī* prescription concrete cases (*syiqaq*, *khuluk*, and *li'an*) because the social context is loaded with time, space, circumstances, motivations, and traditions of the Muslim community. In this way, the *shar'ī* values can be integrated with the values of modernity.

Keywords: Change, Law Enforcement, Court Decision, Cases of *Syiqaq*, *khuluk*, *li'an*

## ملخص البحث

إن قضايا الشقاق، والخلع، واللعان هي قضايا خاصة (أحكام شرعية) واردة في القانون رقم 1989/7 بشأن المحاكم الشرعية ومجموعة الأحكام الإسلامية. ويعد هذا القانون أساساً لتسوية الطلاق. ولكن المحاكم الشرعية بجورونتالو لا تطبق هذا القانون، وهذه القضايا الثلاث الخاصة تتحول إلى قضايا عادية (الطلاق و التقاضى في الطلاق)، وبناء على هذه الخلفية، فإن مشكلة هذا البحث هي لماذا تغير تطبيق القانون المتعلق بالشقاق، والخلع، واللعان في قضية الطلاق في المحاكم الشرعية التابعة لمحافظة جورونتالو؟. ويمكن تصنيف المشاكل إلى الأمور التالية: (1) ما هي منزلة القانون وخصائص الطلاق بسبب الشقاق والخلع واللعان، (2) كيف كان تطبيق القانون المتعلق بالشقاق والخلع واللعان في قضية الطلاق في المحاكم الشرعية التابعة لمحافظة جورونتالو؟ (3) ما هي العوامل التي تؤثر على تغيير القانون المتعلق بالطلاق بسبب الشقاق والخلع واللعان في قرار القاضي؟.

استخدم الباحث الطرق التالية؛ النوع من البحث هو بحث مكتبي، ومنهجه قضائي-قانوني واجتماعي. وتم استخدام ثلاث نظريات في هذا البحث، وهي اكتشاف القانون كنظرية كبرى، والفقه الاجتماعي كنظرية المجموعة الوسطى ونظرية تغيير الأحكام من ابن القيم كنظرية تطبيقها. وتكون مصادر البيانات البحثية من المواد القانونية الأولية والثانوية والإضافية. وتم أخذ عينة البيانات باستخدام أخذ العينات الهادفة. وأما تحليل البيانات فتم استخدام التحليل النوعي وتحليل المحتوى.

وتوصل هذا البحث إلى ما يلي: (1) منزلة قانون الطلاق بالشقاق والخلع واللعان التي كانت مقننة في المذهب الفقهي على أساس القانونية الرسمية تحولت إلى القانون الوضعي، وأصبحت منصوبة في القانون رقم 1989 / 7 ومجموعة الأحكام الإسلامية. وهذه القضايا الثلاث تتميز بخصائص مختلفة عن حالات الطلاق والتقاضى في الطلاق. (2) وفي تطبيق أحكام الشقاق والخلع واللعان، يتمسك القاضي بنصوص القانون. عندما لا يوجد القانون فيقوم القاضي باكتشاف القانون (rechtsvinding) باستخدام طريقة التفسير وبناء القانون. وهذا الذي يأدى إلى تغيير الأحكام لهذه القضايا. والقاضي لا يركز

تفكيره على ثبات القانون فقط، ولكنه يهتم بالمصلحة والعدالة أيضا. (3) تغيير تطبيق القانون المتعلق بالشقاق والخلع واللعان على أساس تحليل أنماط تفكير القاضي القانوني يشير إلى أن التطبيق لا يفي بثلاثة أمور؛ ثبات ومصلحة وعدالة. وهذا الأمر يتأثر بعاملين: **أولهما**، العوامل الخارجية. وهذه العوامل تشمل الحالة، والوقت، والتحفيز. وبالإضافة إلى ذلك، لقد لعب العامل القانوني الرسمي أو قانون الزواج بدور فعال في تغيير القضايا الثلاث عن طريق تحويل القيم الفقهية الكلاسيكية إلى القيم الجديدة. **ثانيهما**، العوامل الداخلية، وهذه العوامل تتمثل في القاضي في أداء واجباته، ويستطيع القاضي أن يضمن حرية القضاء، وأن يتصرف باحتراف، ويدرك تماما أخلاقيات المهنة. وإذا توفرت هذه العوامل لدى القاضي، فيصدر القاضي حكما جديدا موافقا لمبادئ وقيم الإسلام في الوقت الحاضر. ولمعرفة ما إذا كانت هذه العوامل تتوفر لدى القاضي في المحاكم الشرعية التابعة لمحافظة جورونتالو، يفترض أن يكون هناك بحث متواصل حول هذا الموضوع.

وبناء على نتائج البحث السابقة، أوصى الباحث طريقة سببية وإعادة التحقيق كطريقة تغيير القانون المتعلق بالقضايا الثلاث. السببية عبارة عن عملية التفكير باستخدام قانون السببية، سواء كانت بشكل رسمي، أو مادي، أو طبيعي. وهذا التفكير يتم استخدامه في عملية التحقق (konstatiring) وأخذ القرار القانوني (konstituiring). وفيما يتعلق بتغيير القانون، فعلى القاضي أن يعيد التحقيق. بعبارة أخرى، يجب على القاضي أن ينظر إلى السياق الاجتماعي عندما يواجه قضايا الشقاق والخلع واللعان، لأن هذا السياق يشمل الزمان والمكان، والظروف، والدوافع، وتقاليده المجتمع المسلم. وإن القيم الشرعية يمكن بهذه الطريقة أن تكون متكاملة مع الحداثة.

**الكلمات المفتاحية: تغيير، تطبيق القانون، قرار، قضايا الشقاق، الخلع،**

**اللعان**



## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan disertasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

---

<sup>1</sup> Pedoman Penulisan Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012, hlm. 31-34.

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsononan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	muta' aqqidīn
عِدَّة	ditulis	‘iddah

## C. Ta' Marbutoh

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Aran yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

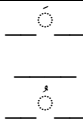
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah di tulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dhammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'idat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (c) -nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat dan anugrahNya sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu di ruang ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terkira kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini, yaitu:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, dan Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Noorhaidi, MA. M.Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan Ketua/Sekretaris Program Doktor serta seluruh staf dan karyawan atas pelayanan akademiknya.
3. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., dan Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA. selaku Promotor, yang telah memberikan kritikan, bimbingan dan arahan atas penulisan disertasi ini. Tanpa jerih payah, pikiran, dan restu mereka, disertasi ini tidak akan selesai. Keduanya tidak hanya melakukan koreksi, tetapi juga dengan tulus melakukan kritik konstruktif demi kemapanan isi disertasi.
4. Dr. Samsul Hadi, M.Ag., Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL., dan Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D. selaku Penguji yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran kritis untuk penyempurnaan disertasi ini, kepada beliau saya ucapkan penghargaan yang tak terhingga
5. Para Guru Besar serta seluruh dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Kehadiran mereka telah membuka wawasan dan kesadaran intelektual barn dalam memperluas cakrawala keilmuan kelembagaan Islam.
6. Dr. Kasim Yahidji selaku Rektor dan para Pembantu Rektor, beserta jajaran civitas akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo atas dukungan dan motivasinya kepada penulis untuk segera

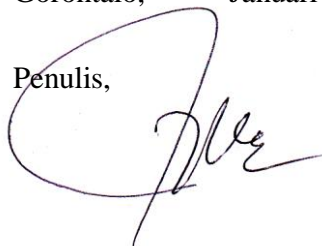


- menyelesaikan penulisan disertasi ini.
7. Kepada kedua orangtua, Syamsudin Iyonu dan Rusni Musa tak luput Penulis haturkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas Pengorbanan, curahan kasih dan sayang, serta bimbingan, motivasi dan bantuan dalam penyelesaian penulisan disertasi ini. Dan semoga keduanya selalu dalam lindungan Allah SWT.
  8. Suami tercinta Rizan Adam S.Pd., M.HI. atas kesabaran dan dorongannya; dan putra-putri terkasih, Muh.Fakhrul Adam, Marha Fathu Masthurah, Nurul Tazkhiah, yang selalu menjadi inspirasi dan memotivasi penulis selama penyelesaian studi hingga penulisan disertasi ini.
  9. Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah membantu memberikan bantuan dalam penyelesaian studi penulis.
  10. Ketua Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo dan seluruh jajarannya, atas perkenannya dalam memberikan informasi, baik menyangkut data perkara maupun salinan putusan yang menjadi sampel penelitian.
  11. Kepada semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik moral maupun materil dalam penyelesaian studi di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kiranya seluruh bantuan mereka menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah swt

Gorontalo, Januari 2017

Penulis,



Titin Samsudin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN REKTOR.....	ii
YUDISIUM .....	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	v
PENGESAHAN PROMOTOR.....	vi
NOTA DINAS .....	vii
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL .....	xxvii
DAFTAR GAMBAR.....	xxviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
D. Kajian Pustaka .....	19
E. Kerangka Teori .....	25
F. Metode Penelitian .....	47
G. Sistematika Pembahasan .....	55
 <b>BAB II : KEDUKAKAN HUKUM DAN KARAKTERISTIK PERCERAIAN KASUS SYIYAQ, KHULUQ DAN LI'AN DI PERADILAN AGAMA .....</b>	   57
A. Hukum dan Karakteristik Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama .....	57
B. Hukum dan Karakteristik Perceraian Kasus <i>Syiqaq</i> dan Perselisihan Perceraian pada Umumnya .....	65
C. Hukum dan Karakteristik Perceraian Kasus <i>Khuluk, Taklik Talak</i> dan Cerai Gugat .....	93

D. Hukum dan Karakteristik Perceraian Kasus <i>Li'an</i> dan Pelanggaran Perbuatan Zina .....	123
<b>BAB III : DESKRIPSI PENERAPAN HUKUM PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SE-PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006-2009 .....</b>	<b>135</b>
A. Pengadilan Agama Se-Provinsi Gorontalo .....	135
B. Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Se-Provinsi Gorontalo .....	137
C. Penerapan Hukum Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Se-Provinsi Gorontalo .....	139
1. Penerapan Hukum Putusan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama.....	139
2. Faktor-faktor Umum Terjadinya Perceraian .	144
3. Alasan-alasan Dalam Putusan Cerai Talak dan Cerai Gugat.....	152
<b>BAB IV :. PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN KASUS <i>SYIQAQ</i>; PENYELESAIAN DAN PERUBAHANNYA .....</b>	<b>173</b>
A. Tahapan Mengkonstatir, Mengkualifikasi, Mengkonstituir.....	173
1. Mengidentifikasi Fakta Hukum Alasan terjadinya Perceraian <i>Syiqaq</i> .....	176
2. Pembuktian dalam Perceraian <i>Syiqaq</i> .....	182
3. Mengangkat Hakam dalam Penyelesaian Perceraian <i>Syiqaq</i> .....	193
B. Interpretasi Ekstensif pada Perkara <i>Syiqaq</i> .....	200
C. <i>Argumentum 0 Contrario</i> Perkara <i>Syiqaq</i> pada Perselisihan Biasa .....	206
<b>BAB V : PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN KASUS <i>KHULUK</i>; AMBIGUITAS DAN PERUBAHANNYA .....</b>	<b>219</b>
A. Interpretasi Sosiologis pada Kasus <i>Khuluk</i> .....	219
1. Fakta Hukum Alasan Perceraian Sebab <i>Khuluk</i> .....	220
2. Pembayaran <i>Iwad</i> dalam Kasus <i>Khuluk</i> .....	223

3. Putusan <i>Khul'I</i> pada Alasan <i>Talik Talak</i> .....	229
B. <i>Argumentum Peranalogian</i> Kasus <i>Khuluk</i> pada Kasus <i>Taklik Talak</i> .....	236
<b>BAB VI :PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN KASUS <i>LI'AN</i>; KONSTATASI DAN PERUBAHANNYA</b> .....	245
A. <i>Argumentum O Contrario</i> Perkara <i>Li'an</i> pada Pelanggaran Perbuatan Zina .....	245
1. Alasan Terjadinya Perceraian <i>Li'an</i> .....	254
2. Pembuktian dalam Kasus <i>Li'an</i> .....	257
3. Pengangkatan Sumpah dalam Kasus <i>Li'an</i> ...	263
B. Penghalusan ( <i>Rechvervijning</i> ) Pelanggar Perbuatan Zina .....	265
<b>BAB VII : FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERUBAHAN PENERAPAN HUKUM <i>SYIQAQ KHULUK</i> DAN <i>LI'AN</i></b> .....	273
A. Faktor External .....	273
1. Perubahan Keadaan dalam Penerapan Hukum <i>Syiqaq</i> .....	274
2. Perubahan Waktu dalam Penerapan Hukum <i>Khuluk</i> .....	286
3. Perubahan Motivasi dalam Penerapan Hukum <i>Li'an</i> .....	291
B. Faktor Internal.....	298
1. Jaminan terhadap Kebebasan Peradilan/Hakim.....	302
2. Kualitas Profesionalisme Hakim dan Penghayatan Etika Profesi .....	308
<b>BAB VIII : KESIMPULAN</b> .....	315
A. Kesimpulan .....	315
B. Saran-saran.....	322
DAFTAR PUSTAKA.....	325
LAMPIRAN.....	341
BIODATA PENELITI.....	343

## DAFTAR TABEL

- Tabel.1 Karakteristik Istilah Gugatan Perceraian dalam Perundang-undangan Perkawinan di Pengadilan Agama, 64
- Tabel. 2 Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo, 137
- Tabel. 3 Laporan Tahunan Perkara yang masuk di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Tahun 2006- 2009, 138
- Tabel. 4 Distribusi Perkara Peradilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Tahun 2006-2009, 138
- Tabel. 5 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tentang Perceraian sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Th. 2006-2009, 145
- Tabel. 6 Gambaran Umum Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian se- Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Th. 2006-2009, 146
- Tabel. 7 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Tiga Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Tahun 2006-2009, 147
- Tabel. 8 Alasan perceraian menurut aturan perundang-undangan, 152
- Tabel. 9 Alasan-alasan Gugatan Perceraian Dalam Kasus Cerai Talak di Wilayah PTA Gorontalo, 160
- Tabel. 10 Alasan-alasan Gugatan Perceraian Dalam Kasus Cerai Gugat di Wilayah PTA Gorontalo, 163
- Tabel. 11 Klasifikasi Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo, 168

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar. 1 Kategori *Syiqaq* Menurut Ulama, 69
- Gambar. 2 Kategori *Syiqaq* Menurut Praktisi Hukum, 74
- Gambar. 3 Alasan Perselisihan dalam Peraturan Peradilan Agama, 92
- Gambar. 4 Kategori Cerai Gugat di Peradilan Agama, 121
- Gambar. 5 Kategori Perceraian dengan Alasan Zina di Peradilan Agama, 134
- Gambar. 6 Terjadinya Cerai Talak, 177
- Gambar. 7 Terjadinya Cerai Gugat, 278
- Gambar. 8 Terjadinya *Syiqaq*, 180
- Gambar. 9 Perceraian atas Permintaan Istri, 223
- Gambar. 10 Perceraian dengan *Khul'i*, 231
- Gambar. 11 Penerapan Putusan *Khuluk*, 240
- Gambar. 12 Gugatan Perceraian dengan Alasan Zina, 246
- Gambar. 13 Konstruksi/*Argumentum o Contrario* Kasus *Li'an*, 247
- Gambar. 14 Pembuktian dalam Alasan Zina, 259
- Gambar. 15 Pengangkatan Sumpah *Li'an*, 264
- Gambar. 16 Konstruksi/*Rechverwijning* Alasan Zina, 267
- Gambar. 17 Perubahan Keadaan dalam Penerapan *Syiqaq*, 285
- Gambar. 18 Perubahan Waktu dalam Penerapan *Khuluk*, 291
- Gambar. 19 Perubahan Motivasi dalam Penerapan *Li'an*, 297
- Gambar. 20 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Peneran *Syiqaq*, *Khuluk* dan *Li'an*, 313

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Daftar Nama-nama Responden, *341*





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, aspek-aspek kehidupan sosial budaya masyarakatnya diatur dengan hukum. Salah satu aspek kehidupan tersebut adalah perkawinan. Eksistensi perkawinan yang terjadi pada masyarakat Indonesia diatur dalam hukum negara dan hukum Islam. Dua jenis hukum ini berbeda orientasi penerapannya. Hukum negara berorientasi mengatur perihal perkawinan pada masyarakat Indonesia secara umum, sedangkan hukum Islam berorientasi mengatur perkawinan pada masyarakat Indonesia secara khusus, yaitu masyarakat yang beragama Islam. Dengan pernyataan singkat, hukum negara berlaku secara umum; hukum Islam berlaku secara khusus.

Hukum negara yang mengatur perihal perkawinan direalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 sebab Undang-undang tersebut berlaku secara umum untuk seluruh agama pada masyarakat di Indonesia. Sebaliknya, hukum Islam yang mengatur perkawinan khusus pada masyarakat yang beragama Islam direalisasikan melalui Kompilasi Hukum Islam. Peraturan hukum ini mengandung konsep yang berbeda dalam hal mengatur masalah perkawinan meskipun perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hal-hal yang prinsipil tentang perkawinan; peraturan pemerintah mengatur tentang pelaksanaan perkawinan; Kompilasi Hukum Islam mengatur ihwal perkawinan pada masyarakat Islam.

Perbedaan sebagaimana dikemukakan dalam uraian di atas dapat diamati melalui rumusan isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumusan isi Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perbedaan itu menyangkut konsep perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Sementara itu, dalam rumusan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*

Apabila dicermati isi kedua pasal tersebut, tampak bahwa konsep perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menitikberatkan pada unsur ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam posisi keduanya sebagai suami dan istri, sedangkan konsep perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih menitikberatkan pada unsur akad. Dengan kata lain, unsur penanda perkawinan pada UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, sedangkan unsur penanda perkawinan pada KHI adalah akad. Istilah perkawinan dan pernikahan pun mengandung arti yang berbeda. Pada rumusan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dapat saja dilakukan meskipun tanpa akad (sesuai aturan agama yang dianut masyarakat), sedangkan pada rumusan Pasal 2 KHI dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dapat dilakukan kecuali dengan akad.

Perbedaan lainnya yang diperoleh dari rumusan isi Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dengan rumusan isi Pasal 2 KHI di atas adalah tujuan perkawinan. Pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah *membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, sedangkan pada Pasal 2 KHI tujuan perkawinan adalah *untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah*. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan

dalam Pasal 2 KHI adalah menjalankan perintah Allah, sedangkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam rumusan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ini diatur tersendiri dalam Pasal 3, yakni “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah*”. Sakinah artinya kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan; mawadah artinya kasih sayang; dan rahmah (rahmat) artinya karunia atau berkah. Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan, dilandasi oleh kasih sayang sehingga mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Akan tetapi, masalah perkawinan tidak hanya berhenti pada tercapainya tujuan perkawinan. Lebih dari itu, yang penting diperhatikan dalam melaksanakan perkawinan atau pernikahan adalah sah tidaknya perkawinan/pernikahan itu. Meskipun perkawinan sudah terjadi dan tujuan sudah tercapai, bukan berarti perkawinan itu sudah dapat dikatakan sah. Sah tidaknya sebuah perkawinan tidak ditentukan oleh bahagia tidaknya pasangan suami istri yang melakukan perkawinan, melainkan ditentukan oleh hukum masing-masing agama. Artinya, meskipun pasangan suami istri bahagia atau tidak bahagia dalam rumah tangganya, hubungan mereka sebagai suami istri tetap sah apabila perkawinan mereka didasarkan pada ketentuan agama yang mereka anut. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan (UUP) yakni, “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama.*”

Seperti halnya perkawinan, perceraian juga merupakan aspek kehidupan masyarakat yang keberadaannya diatur oleh hukum. Apabila pasangan calon suami istri memiliki alasan-alasan tertentu ketika hendak melangsungkan perkawinan atau hendak membentuk keluarga baru, maka dalam hal melaksanakan perceraian pasangan suami istri juga harus menyertakan alasan-alasan yang kuat jika hendak mengajukan perceraian ke pengadilan. Tanpa adanya alasan

yang kuat dari kedua belah pihak, perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan tidak dapat diproses oleh pengadilan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa alasan mengajukan perceraian ke pengadilan penting dalam pandangan hukum. Mengingat hal itu penting, negara mengatur perihal alasan perceraian melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 32 tentang Perkawinan. Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No 1. Tahun 1974. Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam<sup>1</sup>. Undang-undang Perkawinan ini merupakan hukum materil Peradilan Agama bagi umat Islam yang keberadaannya mesti dipatuhi dan diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, hukum normatif (selanjutnya diistilahkan *law in the books*) terdapat dalam Alquran dan Hadis serta kitab-kitab fikih. Hukum ini tidak akan berpengaruh dan tidak akan memiliki kekuatan apa-apa tanpa diupayakan menjadi hukum terapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara formal. Oleh karena itu, agar memiliki pengaruh dan kekuatan di dalam penerapannya, hukum normatif (*law in the books*) itu diubah atau dialihkan menjadi hukum positif (*law in action*). Hanya dengan mengubahnya menjadi *law in action* atau menjadi suatu peraturan perundang-undangan, penerapannya memiliki daya paksa yang kuat.

Menyadari hal tersebut, negara berinisiatif mengangkat hukum normatif atau *law in the books* menjadi hukum positif atau *law in action*. Upaya ini ditempuh berdasarkan pertimbangan bahwa dalam perspektif ilmu hukum di Indonesia, hukum positif dipandang legal secara yuridis dibandingkan dengan hukum normatif<sup>2</sup>. Oleh karena itu, sudah semestinya warga negara Indonesia yang beragama Islam menghargai upaya yang telah ditempuh oleh negara terkait dengan perubahan hukum tersebut. Penghargaan itu dapat diwujudkan melalui tindakan menerapkan hukum positif dalam memutuskan

---

<sup>1</sup> Bunyi pasal-pasal tersebut di atas dapat dilihat pada halaman 146, tabel 7 bab III dalam Disertas ini.

<sup>2</sup> H.M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 8-9.

perkara perceraian karena mempertahankan *law in the books* hanya akan menyebabkan hukum menjadi kontradiktif.

Kontradiksi hukum sebagaimana dimaksud pada uraian tersebut dapat dicontohkan melalui kasus talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya di luar persidangan. Dalam pandangan hukum normatif, jatuhnya talak seorang suami kepada istrinya menandakan bahwa hubungan antara suami istri tersebut telah putus. Akan tetapi, dalam pandangan hukum positif, hal tersebut tidak diakui. Artinya, hubungan suami istri belum putus atau keduanya belum dapat dikatakan sudah bercerai. Hal ini dikarenakan tindakan suami menjatuhkan talak kepada istrinya dilakukannya di luar persidangan. Sementara itu, dalam pandangan hukum positif, perceraian hanya akan dianggap sah apabila putusannya dilakukan di pengadilan.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama untuk masyarakat muslim, tampak adanya kontradiksi antara hukum yang satu dengan hukum lainnya. Misalnya, perbedaan antara ketentuan Undang-Undang perkawinan dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa bentuk ketentuan perceraian, seperti cerai talak, cerai gugat, *syiqaq*, *khuluk*, *li'an* dan perceraian akibat kematian suami, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam penerapannya. Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, hanya dikenal satu bentuk perceraian, yaitu perceraian yang dapat dimohonkan oleh pihak suami maupun istri.

Selain kontradiksi antara ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, kontradiksi penerapan hukum perceraian juga terjadi pada tataran aplikasinya. Kontradiksi ini muncul sebagai akibat perbedaan penafsiran hakim terhadap isi pasal yang ada. Salah satunya adalah Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

*“Segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang*

*bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.*

Maksud isi rumusan pasal tersebut berbeda dalam pandangan para hakim. Akibatnya, dalam penerapannya pun terjadi perbedaan. Munculnya perbedaan ini dipengaruhi oleh tuntutan ketundukan hakim pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda, yaitu hukum Syariah Islam dan Hukum Negara.<sup>3</sup> Di satu sisi dalam memutuskan perkara perceraian hakim dituntut harus tunduk pada hukum Syariah Islam, di sisi lain hakim dituntut harus tunduk pada Hukum negara. Padahal dasar kedua hukum tersebut berbeda. Hukum Syariah Islam mendasarkan pemahamannya pada ideologi asal muasal, tujuan, serta fungsi yang diembannya sesuai dengan konsep awal pendirian Peradilan Agama di Indonesia<sup>4</sup>, sedangkan Hukum Negara mendasarkan pemahamannya pada status serta kedudukan hukumnya yang dibentuk dan diselenggarakan oleh negara sebagai Pengadilan Negara<sup>5</sup>.

Menyikapi fenomena tersebut, negara memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat muslim. Kewenangan itu diperkuat melalui hasil penerbitan UU No.7/1989 jo. UU No.3/2006 jo. UU No.7/1980 jo. UU No. 50/2009 perubahan atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang yang mengatur pemberlakuan Hukum Perdata sebagaimana pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UUPA No.7/1989 itu, memberikan kedudukan penting bagi Badan Peradilan Agama dalam Negara Hukum Republik Indonesia sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang dikhususkan untuk masyarakat Islam dengan

---

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004* (Yogyakarta : UII Press, 2007), 34.

lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya maupun mengenai pencari keadilannya (*justiciabel*).<sup>6</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian diatur dalam pasal 65 Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sebagai berikut:

“Perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Bentuk-bentuk perceraian menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam seperti yang sudah diuraikan sebelumnya mencakup *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an*. Masing-masing bentuk perceraian ini memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda yang keberadaannya telah terakomodasi dalam hukum materil dan hukum formil perundang-undangan perkawinan di Peradilan Agama. Ketentuan perceraian alasan *syiqaq* telah diatur dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>7</sup> Dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975<sup>8</sup> penjelasan ini diadopsi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f). *Khuluk* diatur dalam Pasal 1 huruf (i) KHI<sup>9</sup>, dan alasan *li'an* dirumuskan dalam KHI Pasal 126.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca-UU No 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 1.

<sup>7</sup> Penjelasan *syiqaq* dirumuskan dalam Pasal 76 ayat 1, yakni *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.

<sup>8</sup> Pasal tersebut berbunyi; Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 76 ayat 2 dikatakan: “Hakam ialah, orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*”. M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 244-255, dan perkataan *syiqaq* dirujuk dalam Q.S. An-Nisaa (35): *Wain hiftum syiqoqon bainahum*.

<sup>9</sup> Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, “*Khuluk* ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya”. Perceraian dengan jalan *khuluk* diatur dalam Pasal-Pasal 1 huruf i, 8, 124, 131, 148, 155, 161 dan 163 dalam KHI. Perceraian dengan *khuluk*

Hal yang menjadi persoalan sehubungan dengan hukum perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam adalah diabaikannya bentuk-bentuk perceraian itu dalam persidangan. Bahkan, tidak ditemukan ketetapan hukumnya dalam putusan Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Propinsi Gorontalo. Secara faktual, bentuk-bentuk perceraian itu ada. Namun, upaya penyelesaiannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum materiil dan hukum formil yang berlaku dalam perundang-undangan perkawinan Peradilan Agama. Buktinya dapat dilihat melalui putusan pengadilan Agama Provinsi Gorontalo berikut ini.

*Putusan pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 15/pdt.G/20  
08/PA.Gtlo  
tanggal 8 Januari 2008 dalam perkara cerai gugat*

*“Perkara yang diajukan seorang istri, yang berkedudukan sebagai Penggugat dan suaminya berkedudukan sebagai pihak tergugat. Dalam positanya mendalilkan, bahwa sejak tahun 1990 kehidupan rumah tangganya dengan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan tergugat kurang memenuhi kewajibannya memberi nafkah biaya hidup kebutuhan penggugat.*

*Tergugat suka memukul dan mengancam membunuh penggugat. Tergugat suka ganti-ganti pasangan (perempuan) bahkan tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat, pada tahun 1991 tergugat telah menikah dengan seorang perempuan dan mereka telah tinggal serumah. Meski demikian penggugat tetap bersabar selama 8 tahun*

---

karena pelanggaran *ta’lik talak* di selesaikan menurut cerai gugat. Cerai gugat diatur dalam Pasal 40 UU No.1/1974, Pasal 20-36 pp. No 9/75, Pasal 73-88, Pasal 113-148 KHI.

<sup>10</sup> Penjelasan ayat tersebut sebagaimana berikut; “*li’an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut”. *Li’an* merupakan penyelesaian lain dalam perkara cerai talak dengan alasan istri berbuat zina yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur ikrar talak biasa (Pasal 88 ayat (1) UU-PA), *li’an* merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal-Pasal 43, 70, 101, 125, 126, 127, 128, 155, 162 dan 163 KHI dan juga diatur dalam Pasal 87, Pasal 88 ayat (1) UU-PA.



*lamanya dengan harapan tergugat dapat berubah, meskipun selama itu pula keadaan mereka sudah hidup terpisah, serta tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin.*

*Dari hasil replik duplik, tergugat menyampaikan dalil gugatannya, bahwa tergugat membenarkan dalil penggugat. Akan tetapi tergugat memberi alasan bahwa hal itu dilakukan karena penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sejak 4 tahun berlalu, serta membantah dalil penggugat yang menyatakan terpisah hidup berumah tangga selama 8 tahun, dan sebenarnya perpisahan mereka berkisar 6 tahun lamanya”.*

*Berdasarkan pembuktian dua orang saksi dari pihak penggugat, dan melalui tahapan-tahapan beracara, maka majelis hakim menimbang, bahwa gugatan penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No 1/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI,<sup>11</sup> dan mengadili dengan menjatuhkan talak satu ba'in dari tergugat kepada penggugat.*

Apabila dilihat posita alasan-alasan yang diajukan penggugat dalam putusan tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan perceraian tersebut di atas telah memenuhi beberapa ketentuan hukum, terutama mengenai bentuk-bentuk perceraian. Beberapa ketentuan hukum yang telah terpenuhi dalam putusan perkara cerai di atas adalah sebagai berikut.

*Pertama, bentuk perceraian pelanggaran taklik talak. Bentuk perceraian ini tampak pada alasan yang diberikan oleh penggugat, yaitu tergugat melakukan kejahatan yang membahayakan sampai mengancam untuk membunuh tergugat. Tindakan yang dilakukan tergugat, telah memenuhi ketentuan hukum, dalam hal ini pasal 39 ayat (2) UU No.1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP. No 1/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) KHI.<sup>12</sup> Dengan demikian ketentuan hukum di atas*

---

<sup>11</sup> PP. No.1/1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Pasal 116 huruf (b) yang berbunyi : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”; PP. No.1/1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) berbunyi: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

<sup>12</sup>Huruf (d) berbunyi: ”Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

merupakan pelanggaran *taklik talak*. Jika terjadi pelanggaran *taklik talak* seharusnya amar putusannya berbunyi talak *khul'i* dan bukan talak satu *ba'in* yang digunakan dalam amar putusan cerai gugat (biasa).<sup>13</sup>

*Kedua*, bentuk perceraian *syiqaq*. Bentuk perceraian ini tampak pada alasan yang diberikan penggugat, yaitu di dalam rumah tangga telah terjadi percekcoan terus-menerus serta terindikasi adanya unsur-unsur *darar* yang dapat membahayakan kehidupan suami istri dan akan mengakibatkan pecahnya perkawinan. Kententuan *syiqaq* ini diatur dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f). Meskipun dalil pada huruf (f) sering dijadikan dasar untuk menangani perselisihan biasa, aturan tersebut dijadikan pula sebagai dalil *syiqaq*<sup>14</sup>.

*Ketiga*, bentuk perceraian *li'an*. Bentuk ini dapat dilihat dari adanya replik duplik. Sebagaimana hasil duplik yakni bantahan jawaban tergugat kepada penggugat dengan memberikan alasan bahwa penyebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga adalah

---

<sup>13</sup> Meskipun putusan *khul'i* termasuk dalam kategori bain, tidak selamanya putusan bain adalah *khul'i*. Teknis penulisan amar putusan di Peradilan Agama dalam buku II dijelaskan, untuk amar putusan pelanggaran talik talak berbunyi: “Menjatuhkan talak satu *khul'i* tergugat (nama....bin.....) dengan iwal berupa uang sebesar Rp..... (...tuliskan dengan huruf besar)”; untuk amar putusan cerai gugat berbunyi: “Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (nama....bin.....) terhadap penggugat (nama....bin.....)”; amar putusan untuk pelanggaran talik talak hakim memutuskan dengan *khul'i*, berbeda dengan cerai gugat pada umumnya (biasa) dengan amar putusan *ba'in shughra*. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010* (Jakarta: MA-RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), 154-155.

<sup>14</sup> Tidak selamanya alasan perselisihan terus menerus Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) didasarkan pada perselisihan *syiqaq*, dikatakan *syiqaq* apabila perselisihan sudah sangat tajam dan berakibat *dharar* yaitu mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri. Sebaliknya, apabila pertengkaran dan perselisihan tersebut belum mengandung unsur membahayakan dan belum sampai ke tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqaq*. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 387

*“penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain”*<sup>15</sup>. Tuduhan pihak tergugat kepada penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh tergugat. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam, tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya itu sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 126 KHI<sup>16</sup> sebagai dasar hukum *li'an*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa diabaikannya bentuk-bentuk perceraian dalam persidangan serta tidak ditemukan ketetapan hukumnya dalam putusan Pengadilan Agama disebabkan oleh adanya kumulasi alasan pengajuan perkara perceraian oleh pihak penggugat. Sejak awal perkara perceraian diajukan ke pengadilan, pihak penggugat tidak memberikan alasan tunggal. Dengan perkataan lain, alasan yang diberikan bermacam-macam. Akibatnya, bentuk-bentuk perceraian yang masing-masing berbeda karakteristiknya itu, dialihkan hakim menjadi kasus cerai talak dan cerai gugat pada umumnya (biasa).

Pernyataan di atas diperkuat oleh pendapat salah seorang hakim di Pengadilan Agama Se-Provinsi Gorontalo. Ketika diwawancarai, hakim tersebut mengatakan bahwa:

---

<sup>15</sup> Mengapa alasan di atas mengandung unsur *li'an*?. Hal itu dikarenakan, argumen tergugat meninggalkan penggugat dipicu oleh tuduhan tergugat bahwa penggugat telah berhubungan dengan pria lain. Dengan demikian alasan tergugat terhadap penggugat tersebut perlu dibuktikan. Namun, dalam persidangan tergugat tidak dapat membuktikan tuduhannya sehingga hakim mengabaikan alasan yang tidak dapat dibuktikan oleh tergugat. Seharusnya, dalam lembaga *li'an*, jika tuduhan terhadap tergugat tidak dapat dibuktikan, dan istri menolak atas tuduhan tersebut, maka diangkatlah sumpah *li'an* agar tergugat terhindar dari hukuman *qazaf* atas tuduhan zina dan penggugat terhindar dari hukuman *had* zina. Itulah ancaman yang diberikan syar'i terhadap suami yang menuduh istrinya berzina.

<sup>16</sup> Bunyi Pasal 126 KHI adalah: *“Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.* Bunyi Pasal tersebut berlaku umum, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah alasan tuduhan tersebut hanya dapat berlaku pada kasus cerai talak?, Sebaliknya, apakah pada cerai gugat yang istri meminta cerai karena alasan suami menuduhnya berzina atau berselingkuh dapat berlaku secara *li'an*?. Alasan tersebut sering diajukan pula pada pengajuan cerai gugat, sebagaimana contoh kasus di atas, yaitu dari hasil pemeriksaan replik duplik, suami meninggalkannya karena istri dituduh telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Pembahasan lebih lanjut atas masalah ini dapat dilihat pada bahasan penulisan bab-bab selanjutnya.

“Persoalan *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* bila dilihat melalui alasan-alasan gugatan perceraian, terindikasi masuk ke Pengadilan Agama. Namun, kasus *syiqaq* dan *li'an* seringkali dialihkan menjadi hukum kasus cerai talak dan cerai gugat pada umumnya (biasa). Sementara itu, dalam persoalan kasus *khuluk* hanya kategori pelanggaran *taklik talak* yang diterapkan. Adapun pelaksanaan hukum *khuluk* secara murni sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan KHI Pasal 1 huruf i, yakni ‘... adanya pemberian tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya’ tidak diterapkan lagi dalam putusan perceraian di Pengadilan se-Provinsi Gorontalo’.<sup>17</sup>

Fenomena yang disajikan di atas menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan yang terjadi. Idealnya bahwa putusan terhadap ketiga bentuk perceraian tersebut harus disesuaikan dengan karakteristiknya. Terlebih lagi, ketiga bentuk perceraian itu telah menjadi acara khusus dalam perundang-undangan perceraian di Pengadilan Agama. Namun, kenyataannya tidak demikian. Dalam praktiknya, ketiga bentuk perceraian tersebut justru dialihkan kasusnya menjadi kasus cerai talak dan cerai gugat pada umumnya (biasa).

Ketidaksesuaian antara kondisi ideal dengan kenyataan yang terjadi seperti yang diutarakan di atas memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Studi putusan kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo”. Selain karena kontradiksi antara kondisi ideal dengan kenyataan yang ada, penelitian ini didasarkan pula pada alasan penting dan menariknya masalah tersebut dijadikan bahan kajian dalam wujud penelitian ilmiah. Alasan-alasan terkait dengan pentingnya masalah tersebut dianalisis adalah sebagai berikut.

*Pertama*, putusan perkara perceraian berkaitan dengan persoalan nasib penggugat dan tergugat. Apabila hakim salah memutuskan perkara yang sedang ditanganinya, putusan yang dijatuhkan akan dapat berakibat fatal terhadap penggugat. Misalnya, penguat

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Daud, hakim di Pengadilan Agama Kota Gorontalo pada tanggal 13 November 2009.

mengharapkan agar gugatannya diterima, tapi kenyataannya justru ditolak. Akibatnya, penggugat merasa tidak mendapatkan keadilan. Akibat ini dapat berpotensi memunculkan akibat lainnya. Misalnya, karena gugatannya ditolak, penggugat mengalami tekanan psikologis berupa depresi sehingga berakibat pula pada jasmaninya. Terlebih lagi jika tergugat mengancam akan membunuh penggugat.

*Kedua*, dialihkannya kasus perceraian berbentuk *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* menjadi kasus perceraian pada umumnya (biasa) oleh hakim, boleh jadi akan menurunkan kredibilitas hakim di mata masyarakat. Selain itu, hakim pun boleh jadi akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat. Misalnya, hakim tersebut tidak menguasai ilmunya; hakim tersebut lebih memihak mereka yang beruang; hakim tersebut harus disogok, dan alasan-alasan negatif lainnya. Jika hal itu terjadi, kewibawaan hakim akan hilang di mata masyarakat. Hal yang lebih disayangkan lagi, apabila kesalahan itu hanya dilakukan oleh salah seorang hakim, lalu masyarakat menyimpulkannya untuk semua hakim.

*Ketiga*, tidak dijalankannya Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara perceraian sesuai dengan bentuk-bentuk perceraian yang ada, akan berakibat pada buruknya citra Lembaga Pengadilan Agama pada umumnya dan Lembaga Pengadilan Agama Provinsi Gorontalo pada khususnya di hadapan masyarakatnya. Besar kemungkinan masyarakat akan menilai bahwa Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Provinsi Gorontalo tidak layak menangani kasus perceraian.

Selanjutnya, alasan tentang menariknya masalah ini untuk diteliti adalah sebagai berikut.

*Pertama*, hakim diperhadapkan pada dua hal yang bertolak belakang. Di satu sisi ia dituntut menjalankan peraturan dan ketentuan undang-undang, di sisi lain dia juga dituntut harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), baik itu hukum adat maupun hukum agama. Dengan demikian, terjadilah peristiwa tarik menarik antara dua kepentingan yang berbeda yang pada akhirnya menimbulkan polemik pada diri hakim itu sendiri. Dalam kondisi yang demikian itu, hakim pun masih

dituntut untuk mengambil putusan secara tepat dan cepat. Padahal, pengambilan keputusan secara tepat dan cepat membutuhkan waktu yang lama agar fakta-fakta yang terkait dengan perkara perceraian terseleksi dengan baik.

*Kedua*, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum karena hukum berada di antara nilai-nilai atau ide-ide dan dunia kenyataan sehari-hari di tengah masyarakat. Hukum dapat dikatakan bergerak di antara dua dunia yang berbeda sehingga pada saat hukum itu diterapkan, sering terjadi ketegangan. Di satu sisi hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, di sisi lain hukum sudah terlanjur ditetapkan sehingga menyesuaikannya dengan lingkungan maupun struktur masyarakat tempat hukum itu diberlakukan, justru akan menimbulkan ketumpangtindihan.<sup>18</sup>

Kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan yang terjadi serta alasan-alasan yang terkait dengan aspek penting dan menariknya kasus perceraian di pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo itulah yang menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian tentang “Studi putusan kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo” ini difokuskan pada terjadinya perubahan penerapan putusan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dari putusan kasus khusus menjadi putusan perceraian pada umumnya (biasa). Dengan demikian, objek penelitian ini adalah perubahan penerapan hukum dalam putusan kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an*, yakni penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai putusan hakim yang *in concreto*.

Putusan sangat berkaitan dengan penalaran.<sup>19</sup> Shidarta menyatakan dalam hal ini penalaran yang menjadi benang merah lahirnya putusan. Penalaran hukum terutama yang dilakukan hakim

---

<sup>18</sup>Lihat Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publis 2009), Viii.

<sup>19</sup> Penalaran yang dimaksudkan adalah penalaran hukum (*legal reasoning*, *juridisch redenering*) atau biasa disebut argumentasi yuridis.

lebih berelevansi dengan tujuan hukum daripada fungsi hukum.<sup>20</sup> Tujuan hukum lebih menitik beratkan pada arah yang akan dicapai dari berfungsinya hukum<sup>21</sup>. Gustav Radbruch secara sederhana membagi tujuan hukum menjadi tiga yaitu; keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*ZweckmaBigkeit*).<sup>22</sup> Tujuan hukum seringkali dirancukan dengan fungsi hukum. Fungsi hukum atau tugas hukum, menurut Lawrence M. Friedman, meliputi pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan perekayasa sosial (*social engineering*). Dalam hal ini fungsi hukum mengacu pada peranan yang diemban oleh hukum.<sup>23</sup> Dengan demikian lebih ditegaskan lagi dalam penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana pola penalaran hakim dalam melakukan perubahan penerapan putusan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* sebagaimana tersebut di atas.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dikemukakan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah “perubahan penerapan hukum dalam putusan kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo”. Untuk mendalami masalah yang ada dan untuk lebih mengarahkan pengkajian tentang masalah pokok di atas, masalah pokok tersebut diperinci dalam sub-sub masalah yang dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya sebagai berikut.

---

<sup>20</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 181.

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Lihat Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961), 36.

<sup>23</sup> Lihat Lawrence. M. Friedmen, *Law and Society: An Introduction* (New Jersey: Prentice Hall, 1977), 11-12. Dan pemaknaan fungsi hukum sebagai tugas hukum dapat dilihat Roscoe Pound, *The Task of Law* (Lancaster: Franklin dan Marshall College, 1944)

- 1) Bagaimana kedudukan hukum dan karakteristik kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Peradilan Agama ?
- 2) Bagaimana penerapan hukum putusan perceraian kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo?
- 3) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan penerapan hukum pada putusan kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilihat dari dua aspek, yaitu aspek umum dan aspek khusus. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan serta mengungkap terjadinya perubahan penerapan hukum dalam putusan kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Tujuan umum ini disesuaikan dengan masalah pokok yang telah dirumuskan sebelumnya.

Selanjutnya, secara khusus penelitian ini bertujuan: (1) sebagai pengantar untuk memperjelas kedudukan hukum dan karakteristik kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Peradilan Agama; (2) untuk menjelaskan penerapan atau penemuan dan argumentasi hukum yang digunakan hakim, sehingga diketahui bagaimana terjadinya perubahan penerapan hukum dalam memutuskan perceraian kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo; dan (3) penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penerapan hukum pada putusan kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Tujuan khusus ini disesuaikan dengan sub-sub masalah yang juga sudah diuraikan pada bagian rumusan masalah.



## 2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut, dikemukakan pula manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Seperti halnya tujuan penelitian, mafaat penelitian ini dilihat dari dua aspek, yaitu aspek teoretis maupun praktis.

Ditinjau dari aspek teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya, dan ilmu hukum dalam agama Islam pada khususnya, terutama menyangkut putusan perkara perceraian yang masih kontradiktif hingga saat ini. Hasil penelitian ini akan memperkuat kedudukan hukum Islam di hadapan hukum negara terutama yang berkaitan dengan putusan perkara perceraian. Manfaat lainnya adalah hasil penelitian ini dapat memperjelas karakteristik kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* sebagai bentuk-bentuk yang keberadaannya masih menimbulkan polemik pada diri hakim.

Selain diharapkan dapat memperkuat kedudukan hukum Islam, hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memperkuat kedudukan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Semakin digunakan teori itu, semakin diketahui keunggulan dan kelemahannya. Jika teori yang digunakan memperlihatkan keunggulannya, teori tersebut dapat dipertahankan. Sebaliknya, jika teori itu memperlihatkan kelemahannya, perlu diadakan revisi terhadap teori tersebut. Dikatakan demikian, karena meskipun penelitian ini tidak bermaksud menguji teori, secara tidak langsung teori tersebut tetap ada dalam pengujian. Maksudnya, dengan diterapkannya teori dalam penelitian ini, secara tidak langsung teori itu sedang diuji keandalannya.

Ditinjau dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain praktisi hukum, para hakim di Peradilan Agama, perguruan tinggi pencetak para hakim, para pencari keadilan, serta peneliti berikutnya. Manfaat bagi pihak-pihak tersebut lebih lanjut diuraikan berikut.

Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui penerapan, penemuan, penalaran, dan pendapat terkait dengan alasan kasus *syiqaq*, *khuluk*, *li'an*. Pengetahuan tersebut penting dalam rangka memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat terkait dengan kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an*.

Bagi para hakim, khususnya hakim di pengadilan Agama, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memutuskan, menggali, dan menerapkan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat terhadap ketiga kasus tersebut. Dengan menerapkan *living law* terhadap penanganan kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an*, putusan yang dihasilkan akan lebih memiliki kepastian hukum dan berkeadilan, bermanfaat sebagaimana yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Dengan demikian, penelitian ini secara tidak langsung mendorong para hakim untuk meningkatkan kemampuan sumber dayanya.

Bagi perguruan tinggi sebagai pencetak para hakim, hasil penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur dalam mengambil kebijakan terkait dengan pembaruan kurikulum sesuai dengan kebutuhan calon hakim. Melalui hasil penelitian ini, pihak perguruan tinggi dapat mengevaluasi kurikulum yang sedang berlaku, kemudian merevisinya manakala kurikulum tersebut dinilai kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Bagi para pencari keadilan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penambah wawasan agar dalam menghadapi kasus yang sama dengan yang ada dalam penelitian ini, para pencari keadilan sudah memiliki pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi dirinya ketika hendak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dengan pengetahuan itu, para pencari keadilan dapat mengetahui alasan apa yang tepat jika hendak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Selain itu, berkat pengetahuan yang dimiliki, para pencari keadilan juga berpeluang untuk mengoreksi putusan hakim apabila putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi para peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berikutnya memperoleh informasi tentang masalah yang sudah diteliti agar dalam penelitiannya nanti tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian ataupun kajian yang berkaitan dengan putusan-putusan perceraian maupun dalam bentuk *yurisprudensi* di Pengadilan Agama secara umum telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk buku literatur, skripsi, tesis, maupun disertasi. Akan tetapi, penelitian yang benar-benar sama dengan penelitian ini dalam pengetahuan peneliti belum pernah ada, kecuali yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan itu dapat dilihat pada uraian berikut.

Kajian *yurisprudensi* Peradilan Agama dalam bentuk buku literatur pernah dilakukan oleh Satria Efendi M. Zein<sup>24</sup>. Kajian yang berjudul “Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer” itu merupakan kumpulan tulisan yang menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama yang pernah dipublikasikan di dalam majalah *Mimbar Hukum* yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag RI dari Tahun 1990-2001, mulai No 2 Tahun I sampai dengan No 50 Thn XIII, 2001.

Dalam tulisan tersebut, Zein menganalisis enam bagian dari tiga puluh tiga kasus perkara hukum yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang meliputi masalah-masalah perkawinan, harta bersama, perceraian, pemeliharaan anak, wasiat, wakaf dan hibah. Khusus kajian tentang perceraian, Zein membatasi pembahasannya pada empat masalah hukum. Keempat masalah hukum tersebut adalah (1) gugat cerai akibat suami lalai memberi nafkah; (2) gugat cerai akibat suami melakukan poligami; (3) gugat

---

<sup>24</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet-1. (Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2004).

cerai akibat suami melanggar *taklik talak*; dan (4), gugat cerai akibat tidak memiliki keturunan. Untuk menganalisis putusan hukum tersebut Zein memfokuskan pembahasannya pada kajian komparatif vertikal, yang dilaksanakannya dengan memperbandingkan masalah hukum yang dihadapi dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab fikih.

Studi lain yang berkenaan dengan *yurisprudensi* dilakukan oleh Abdul Manan dalam bentuk disertasi dengan judul “Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi”. Dalam penelitiannya itu Manan menitikberatkan kajiannya pada reformasi hukum Islam melalui yurisprudensi di lingkungan pengadilan Agama. Dalam pengamatan Manan, reformasi hukum Islam di Indonesia dilakukan melalui beberapa instrumen, yakni (1) melalui penyusunan ensiklopedi fikih; (2) melalui pembentukan undang-undang; (3) melalui proyeksi fatwa, (4) melalui kajian ilmiah dan penelitian; dan (5) melalui proyeksi putusan Pengadilan Agama.<sup>25</sup>

Lebih lanjut, Manan menyatakan bahwa reformasi hukum Islam melalui ijtihad hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan memiliki nilai strategis bagi pembaruan hukum Islam. Beberapa masalah baru yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan oleh hakim melalui putusan yang sangat dinamis. Misalnya, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1751/P/1989 tentang pengesahan perkawinan lewat telepon yang berbeda dengan ketentuan fikih dan belum ada dalam peraturan hukum positif; putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51K/AG/1999 yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 83/1997/YK tentang penetapan ahli waris nonmuslim berdasarkan wasiat wajibah; putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419 K/AG/2000 tentang penetapan ahli waris pengganti yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/PTA.Sby.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologi, Legalisasi, dan Yurisprudensi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

<sup>26</sup> *Ibid.*, 311-326.

Manan juga dalam penelitiannya itu menyatakan bahwa putusan-putusan tersebut merupakan sebagian dari pembaruan hukum Islam melalui putusan pengadilan yang dikenal dengan yurisprudensi. Manan menyimpulkan bahwa pembaruan hukum melalui yurisprudensi Pengadilan Agama dapat diterima masyarakat karena sesuai dengan cita hukum dan rasa keadilan masyarakat. Masyarakat yang terus berkembang, secara ideal menuntut respons perundang-undangan sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Proses perubahan peraturan perundang-undangan yang menyita waktu menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Dalam kondisi demikian, hakim memiliki peran, yaitu menemukan hukum sesuai dengan cita dan keadilan hukum masyarakat.<sup>27</sup>

Penelitian lain tentang putusan-putusan Pengadilan Agama dalam bentuk disertasi dilakukan oleh Iskandar Ritonga. Penelitian itu berjudul “ Hak-hak Wanita dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995”<sup>28</sup>. Melalui disertasinya itu, Ritonga meneliti apakah hak-hak wanita yang diatur dalam hukum keluarga Islam Indonesia telah diimplementasikan secara proposional dalam setiap putusan-putusan Pengadilan Agama, dan apakah putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama itu berperspektif jender. Dari hasil penelitiannya itu, Ritonga mendeskripsikan beberapa putusan hakim berkaitan dengan jenis-jenis perkara. Adapun objek kajiannya terdiri atas putusan perkawinan, putusan perceraian, dan putusan tentang warisan.

Dalam kajiannya itu, Ritonga menguraikan sembilan kasus, yaitu isbat nikah, izin poligami, pembatalan perkawinan, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan formula satu-satu, warisan bagi cucu yang yatim (ahli waris pengganti) dan warisan bagi anak angkat. Penelitian itu dilakukannya di lingkungan Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 311-326

<sup>28</sup> Iskandar Ritonga, “Hak-hak Wanita Dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1995”, Disertasi, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta; 2003).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Amir Muallim<sup>29</sup> dalam bentuk disertasi dengan judul “Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan PTA Semarang 1991-1997)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh para hakim Peradilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutuskan perkara di pengadilan, juga untuk mengetahui ada tidaknya kontribusi yurisprudensi Peradilan Agama sebagai dasar pengembangan Hukum Islam terutama di bidang legislasi.

Objek penelitian Mu'alim berkisar pada kasus-kasus perkawinan, perceraian dan kewarisan. Bidang perkawinan dan perceraian yang ditelitinya meliputi kasus-kasus poligami, pembatalan dan pencegahan perkawinan, cerai talak dan cerai gugat serta pemeliharaan anak (*hadanah*). Dari hasil penelitiannya itu, Muallim menemukan bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh para hakim dalam memutuskan perkara, masih lebih dominan merujuk pada KHI di samping peraturan-peraturan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dibentuknya KHI sebagai upaya unifikasi hukum di lingkungan peradilan agama mendekati kenyataan.

Selanjutnya, berdasarkan temuannya itu, Muallim merekomendasikan tentang perlunya upaya pengodifikasian hukum Islam di Indonesia sebagai perwujudan jaminan atas kepastian hukum. Sementara itu, penerapan hukum akomodatif memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Menurut Muallim teori ini penting bagi pengembangan eksistensi yurisprudensi dalam wacana pengembangan sumber hukum di Indonesia. Teori ini menghendaki para hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dengan mengakomodasi berbagai

---

<sup>29</sup> Amir Muallim, “Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan PTA Semarang 1991-1997) ”’ Disertasi Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

aspek yang dipandang relevan baik dari aspek historisnya, sosiologisnya, maupun antropologisnya.

Penelitian lain yang juga dipandang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Asasriwarni. Penelitian dengan judul “Studi tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam (Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 1989-1997)”<sup>30</sup> itu membahas masalah putusan perkawinan, perceraian, waris, dan putusan wakaf. Kajian ini dilakukan Asasriwarni untuk mengetahui karakteristik putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama di Padang Tahun 1989-1997 dan untuk mengetahui putusan-putusan yang dihasilkan itu mengandung pembaharuan di bidang pemikiran hukum Islam atau tidak.

Dalam penelitiannya itu Asasriwarni menemukan tiga karakteristik putusan-putusan yang dilahirkan dalam pengadilan. Ketiga putusan itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, hakim-hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang berperan menerapkan apa yang telah diatur dalam undang-undangan, yakni hakim berperan sebagai corong undang-undang. Dalam hal ini hakim telah berupaya melakukan *ijtihad tathbiqy*, yaitu menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, hakim beranjak meninggalkan ketentuan undang-undang dan berpaling kepada ketentuan fikih. *Ketiga*, hakim cukup aspiratif terhadap urf. Ketentuan adat yang masih berlaku dijadikan sebagai penguat dalam putusan-putusan mereka. Putusan-putusan yang dihasilkan mengandung pembaruan di bidang hukum Islam yaitu terdapat dalam putusan tentang dispensasi nikah.

Penelitian lain dalam bentuk disertasi dilakukan oleh Imron Rosyadi. Penelitian tersebut berjudul “Perlindungan Hak-hak Perempuan Pascaperceraian di Indonesia (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan

---

<sup>30</sup> Asasriwarni,” Studi tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam (Kasus wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 1997)”, Disertasi Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Pasal 149 KHI)".<sup>31</sup> Penelitiannya berfokus pada inkonsistensi Pengadilan Agama Provinsi Kepulauan Riau dalam menerapkan Pasal 149 KHI. Permasalahan yang dibahas berkisar pada ketentuan Pasal 149 tidak diterapkan pada setiap kasus perceraian, dan penalaran hakim dalam menerapkan Pasal 149 KHI, serta efektivitas pemahaman Pasal 149 KHI memberikan implikasi terhadap perlindungan hak-hak perempuan pascaperceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi kepulauan Riau.

Dari hasil penelitiannya itu, Imron menemukan bahwa penerapan Pasal 149 KHI pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Provinsi Kepulauan Riau mencapai angka 62% dan 38% untuk kategori tidak menerapkannya. Dalam argumen penalaran hukum, hakim tidak menerapkan Pasal 149 KHI pada sebagian kasus perceraian dengan alasan bahwa domisili istri tidak diketahui, dalam persidangan istri tidak hadir, adanya penilaian nuzuz terhadap istri, tidak ada tuntutan istri, dan ketidakmampuan suami. Adapun hakim yang menerapkan Pasal 149 KHI mengacu pada dua sebab, yaitu karena adanya gugatan *rekonvensi* istri dan karena penggunaan hak *ex officio* oleh hakim.

Penalaran (*legal reasoning*) putusan hakim dalam menerapkan hak-hak perempuan pascaperceraian menggunakan pendekatan *autonomy plus*. Artinya, hakim di samping menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, juga menggunakan aturan lain selain undang-undang seperti Alquran, pendapat ulama dan ilmu pengetahuan lain. Pasal 149 KHI lebih efektif melindungi hak-hak perempuan pascaperceraian secara optimal apabila menggunakan pendekatan legal feminis. Esensi pasal ini menurut Imron merupakan manifestasi dari norma syari'ah yang tujuannya untuk melindungi kepentingan perempuan. Akan tetapi, hasil penelitian Imron memperlihatkan bahwa implementasi Pasal 149 KHI dalam putusan hakim justru lebih cenderung mengarah pada kepentingan

---

<sup>31</sup> Imron Rosyadi, "Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)," Disertasi, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.



laki-laki. Padahal, legal feminis merupakan cara pandang bagaimana hukum melindungi hak-hak perempuan. Dengan demikian, keberanian hakim diperlukan untuk melakukan kreasi hukum dalam melahirkan hukum *in concreto* yang cerdas dan responsif.

Berdasarkan pelacakan pustaka sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diperoleh simpulan bahwa penelitian terdahulu masih terlalu luas cakupannya dan tidak secara spesifik mengkaji masalah perceraian dengan alasan kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* sebagaimana yang dikaji dalam disertasi ini. Dengan demikian, penelitian ini bersifat mengembangkan (*development research*) serta melanjutkan penelitian-penelitian terdahulu.

### E. Kerangka Teori dan Pendekatan

Kerangka teori (*theoretical framework*) yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tiga tataran teori. Pada tataran *grand theory* ditampilkan teori dibidang penemuan hukum (*legal reasoning*). Tataran *grand theory* ini memberi dasar pemahaman tentang pola penalaran hakim dalam memutuskan perkara perceraian, khususnya perceraian kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* di Peradilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Pada tataran *middle range theory*, dipilih suatu kerangka orientasi berpikir yuridis dari salah satu aliran filsafat hukum, yaitu *sociological jurisprudence*, sedangkan pada tataran *applied theory* dipilih teori perubahan penerapan hukum dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. dengan rumusan kaidahnya bahwa perubahan fatwa itu selaras dengan perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi dan tradisi.<sup>32</sup>

Teori di atas digunakan untuk menjawab dua fokus yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu putusan hakim dan perubahan penerapan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* (yang kemudian disingkat *SKL*). Secara sederhana putusan dapat diartikan sebagai hasil dari tindakan memutuskan. Namun, dalam bidang

---

<sup>32</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwāqī'in*, Jld. III (Beirut: Dar al-Jail, 1973), 3

hukum, putusan dapat diartikan sebagai proses penemuan hukum oleh hakim. Oleh karena masalah yang dikaji dalam penelitian adalah putusan hakim, maka teori yang digunakan adalah penemuan hukum yang difokuskan pada penciptaan dan pembentukan hukum (*rechtschepping, law making*).

Selanjutnya, untuk memecahkan atau menjawab masalah perubahan penerapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penerapan hukum *SKL*, digunakan pendekatan penalaran hukum dari aliran mazhab *sociological jurisprudence*. Dengan menggunakan teori tersebut, dapat diketahui pola penalaran (*reasoning*) hakim dalam melakukan perubahan penerapan hukum putusan kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Dan teori perubahan penerapan hukum dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah digunakan untuk melihat sejauh mana hakim Pengadilan Agama melakukan ijtihad terhadap perubahan penerapan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* yang diketahui sebagai hukum khusus yang bersifat *syar'i* yaitu hukum tersebut merupakan kekhususan dan dijadikan asas personalitas ke Islam di Pengadilan Agama.

Teori perubahan penerapan hukum dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dijadikan sebagai *applied theory* karena memiliki kedekatan dengan teori penemuan hukum sebagai *grand theory* dan *sociological jurisprudence* sebagai *middle range theory* dengan meletakkannya sebagai dasar hakim untuk melakukan ijtihad terhadap perubahan penerepan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* (hukum syar'i).

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa pada hakikatnya penelitian ini merupakan penelitian hukum yang *in-concreto* yaitu hukum hasil buatan hakim yang dalam penerapannya telah mengalami perubahan.

Dipilihnya tiga tataran teori; 1) penemuan hukum (*legal reasoning*); 2) *sociological jurisprudence* dan; 3) teori Ibnul Qayyim Al-Jauziah tentang perubahan penerapan hukum, disertai dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana penjelasan berikut;

## 1. Penemuan Hukum (*legal reasoning*)

Masalah penemuan hukum adalah masalah yang khas dalam sistem *civil law*.<sup>33</sup> Salah satu karakteristik dari sistem *civil law* adalah mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber hukum. Dengan demikian, sumber hukum undang-undang menjadi hal paling esensial dalam organ peradilan. Undang-undang sebagai hukum materiil dipakai oleh hakim sebagai landasan dalam memutuskan perkara hukum (*rechtsvinding*). Begitupula untuk dapat menyelesaikan pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, melalui proses peradilan seorang hakim berkewajiban mencari dan menemukan hukum secara objektif untuk diterapkan atau di-*toepassing* memutus perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak,<sup>34</sup> baik melalui hukum tertulis yang termuat dalam hukum materiil maupun hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat atau *living law*. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dan kemudian menjatuhkan putusan, seorang hakim harus mengikuti tiga tahap tindakan di persidangan. Ketiganya mencakup tahap meng-*konstratir*, tahap mengualifikasi, dan tahap meng-konstituir,<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 282.

<sup>34</sup>M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 820.

<sup>35</sup> Ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut; Pertama, tahap meng-*konstatir*. Pada tahap ini hakim memeriksa suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dengan pembuktian-pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum, untuk dicarikan fakta-fakta hukumnya (peristiwa hukum). Hal ini dikarenakan peraturan hukum hanya dapat diterapkan dalam peristiwa hukum, bukan dalam peristiwa kongkretnya. Kedua, tahap mengualifikasi. Pada tahap ini hakim mengadakan penilaian terhadap peristiwa kongkret yang benar-benar telah dibuktikan, atau hakim mengelompokkan dan menggolongkan peristiwa kongkret tersebut ke dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum. Hakim akan lebih mudah memutuskan perkara apabila peristiwanya terbukti dan peraturannya jelas. Ketiga, tahap meng-konstituir. Pada tahap ini hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa yang ada dan memberikan keadilan kepada pihak yang bersangkutan. Lihat Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 54-56.

Dipilihnya teori penemuan hukum ini untuk menjawab permasalahan tentang penerapan hukum putusan *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* yang secara khusus sebagai perkara hukum perceraian yang diatur oleh hukum Islam di Peradilan Agama. Proses penemuan hukum dikalangan ilmuan didefinisikan dalam beberapa pengertian, yaitu pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, dan penciptaan hukum.<sup>36</sup> Menurut Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongkret.<sup>37</sup> Paul Scholten mendefinisikan bahwa penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang bukan hanya menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan pada peristiwa, melainkan juga menyangkut penemuan peraturan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analog ataupun pengongkretan hukum (*rechtsservijining*).<sup>38</sup>

Menurut Laude, penemuan hukum adalah ketentuan pada fakta yang harus dibentuk karena keberadannya tidak selalu dibentuk oleh undang-undang yang ada.<sup>39</sup> Raharjo setelah meneliti beberapa definisi tentang penemuan hukum, menarik kesimpulan yang dipandang lebih lengkap daripada simpulan yang dibuat ahli lain. Simpulan tersebut antara lain (1) penemuan hukum adalah penerapan suatu peraturan yang telah tersedia pada suatu peristiwa; (2) penemuan hukum artinya pembentukan hukum untuk suatu peristiwa kongkret yang tidak tersedia dalam suatu peraturan perundang-undangan atau tersedia tetapi tidak

---

<sup>36</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberti, 1998), 37.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup>N.E Algra dkk., *Asal Mula Hukum*, terj. Simorangkir. dkk., (Bandung: Bina Cipta, 1983), 359.

<sup>39</sup>John Z. Loude, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan fakta* (Jakarta: Bina Aksar, 1985), 69.

jelas, tidak lengkap untuk diterapkan, sehingga hakim harus perlu membentuk hukum melalui metode tertentu.<sup>40</sup>

Berdasarkan metode yang dilakukan hakim, ada beberapa istilah dalam penemuan hukum, yakni *rechtsvinding* dan *rechtschepping*. *Rechtsvinding* adalah penemuan hukum. Penemuan hukum di sini maksudnya bukan hukumnya yang tidak ada. Hukumnya ada tetapi masih perlu digali dan ditemukan lagi. Hukum tidak selalu berupa kaidah (*das solen*) yang tertulis ataupun tidak tertulis, tetapi dapat pula berupa perilaku atau peristiwa (*das sein*). Dari perilaku atau peristiwa yang ada, dapat digali atau diketemukan hukum. Dengan demikian, *rechtsvinding* dapat dikatakan sebagai suatu cara penemuan hukum untuk mendapatkan makna normatif yang ada dalam rumusan asas legalitas di dalam peraturan perundang-undangan<sup>41</sup>.

Selanjutnya, definisi tentang *Rechtschepping*. *Rechtschepping* adalah penciptaan hukum oleh hakim karena belum ada hukum untuk suatu peristiwa. Mengingat hukumnya belum ada, hakim menciptakan hukum itu melalui metode penemuan hukum. *Rechtschepping* dilakukan apabila dalam rumusan hukum yang diatur dalam asas legalitas terdapat hal-hal yang tertinggal dan belum diatur. Karena itu, hakim harus menciptakannya.<sup>42</sup>

Di kalangan praktisi hukum, Manan mengelompokkan metode penemuan hukum menjadi dua, yaitu metode penafsiran (*interpretation*) dan metode konstruksi.<sup>43</sup> Pengelompokan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Bagir Manan. Bagir Manan

---

<sup>40</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), 37.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*..... 88.

<sup>42</sup> Ketentuan tersebut diatur juga dalam UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: “Pengadilan dilarang untuk menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

<sup>43</sup> Abd. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 279 dan 281.

mengklasifikasikan penemuan hukum ke dalam tiga jenis, yaitu; interpretasi (*interpretation*), konstruksi hukum, serta penciptaan dan pembentukan hukum (*rechtschepping, law making*).<sup>44</sup> Akan tetapi, pembentukan dan penciptaan hukum sama-sama merupakan konstruksi hukum karena substansi kedua hal tersebut sama, yaitu menciptakan suatu hukum baru yang sama sekali belum ada sebelumnya.

Selain pendapat para ahli tersebut, Asnawi mendefinisikan penemuan hukum sebagai proses yang dilakukan oleh hakim dalam mencari, menelaah, dan menemukan hukum (dalam arti perundang-undangan dan sumber hukum lain) terhadap satu atau beberapa peristiwa atau fakta hukum (pokok perkara) untuk kemudian menetapkan suatu kaidah hukum yang baru atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa atau fakta hukum yang baru.<sup>45</sup>

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penemuan hukum tidak hanya dalam konteks menemukan kaidah hukum baru, tetapi juga menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa atau fakta hukum baru. Hal ini dikarenakan kaidah hukum lama tidak berarti *out to date* (usang) dan masih terdapat kemungkinan diterapkan pada peristiwa hukum yang baru. Kaidah lama yang masih memungkinkan untuk diterapkan biasanya bersifat kaidah umum sehingga cakupan pemberlakuannya lebih luas, baik dari segi waktu maupun konteks suatu perkara.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa penemuan hukum dapat dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut

---

<sup>44</sup>Bagir Manan, “Beberapa Catatan Tentang Penafsiran”, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 285 Edisi Agustus 2009, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009), 6.

<sup>45</sup>M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim; Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 18.

<sup>46</sup>*Ibid.*

penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret, tetapi lebih dari itu menyangkut penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.<sup>47</sup>

Mengingat putusan perceraian *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* sangat jarang dan bahkan untuk kasus *khuluk* dan *li'an* terbilang tidak ditemukan lagi putusannya dalam penerapan hukum putusan perceraian di Pengadilan Agama se-Propinsi Gorontalo, maka untuk menjawab permasalahan tersebut dari beberapa definisi penemuan hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, teori penemuan hukum yang digunakan untuk menganalisis penerapan hukum putusan perceraian kasus tersebut dalam penelitian ini adalah metode interpretasi dan konstruksi hukum<sup>48</sup> sebagaimana penjelasan berikut;

a. Metode Interpretasi

Interpretasi hukum dapat terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada kasus kongkret yang dihadapi. Metode ini digunakan apabila peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwa kongkret karena mengandung arti yang ambigu, atau makna ganda. Misalnya, ada norma yang tidak jelas (*vage normen*), terdapat konflik antarnorma hukum (*antinomi normen*), dan terdapat ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi terhadap

---

<sup>47</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 52; Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 9.

<sup>48</sup> Menurut Ahmad Ali, ada perbedaan pandangan tentang metode penemuan hukum oleh hakim menurut Yuris yang berasal dari kalangan sistem hukum Eropa Kontinental dan penganut sistem hukum Anglo Saxon. Eropa Kontinental tidak memisahkan secara jelas antara metode interpretasi dan metode konstruksi hukum, sebagaimana dalam buku-buku karangan Paul Scolten, A. Pitlo, dan Sudikno Mertokusumo. Adapun sistem hukum Anglo Saxon memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dengan metode konstruksi hukum, sebagaimana dijelaskan dalam buku karangan B. Arif Sidharta, L.B. Curzon, dan lain-lain. Dan Ia sendiri lebih mengikuti perbedaan yang memisahkan secara tegas antara interpretasi dan konstruksi. Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 113.

peraturan perundang-undangnya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks itu sendiri.<sup>49</sup>

Menurut Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang teks undang-undang. Tujuannya agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran hakim merupakan penjelasan yang harus mengarah pada pelaksanaannya yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa kongkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsinya agar hukum positif berlaku.<sup>50</sup>

Interpretasi dalam pandangan Bagir Manan mengarah pada beberapa pengertian, yakni (1) memahami makna asas atau kaidah hukum; (2) menghubungkan satu fakta hukum dengan kaidah hukum; (3) menjamin penerapan atau penegak hukum dapat dilakukan secara tepat, benar, dan adil; dan (4) mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan (*ekspektasi*) sesuai dengan dinamika di masyarakat.<sup>51</sup>

Penggunaan interpretasi sebagai instrumen dalam mengadili dan memutus suatu sengketa oleh hakim sangat penting. Penyebabnya karena interpretasi tidak hanya bermanfaat dalam menemukan hukum, tetapi juga bermanfaat dalam pengembangan dan pembaruan hukum. Sebagaimana yang umumnya diketahui, rumusan tekstual suatu undang-undang pada dasarnya dibuat sesuai dengan konsensus para legislator yang hidup di zamannya. Padahal, dalam rumusan teks tersebut selalu terdapat keterbatasan dalam merefleksikan

---

<sup>49</sup>Hamidi, *Hermeneutika*..., 52.

<sup>50</sup>Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab*..., 13.

<sup>51</sup>Manan, "Beberapa Catatan...", 5.



kehendak pembuatnya serta dalam menyesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial dan hukum di masyarakat.<sup>52</sup> Oleh sebab itu, hakim perlu berupaya semaksimal mungkin dalam menafsirkan teks undang-undang dengan memperhatikan perubahan dinamika sosial di masyarakat.

Dalam hal menafsirkan ketentuan undang-undang, terdapat beberapa metode interpretasi yang dapat digunakan oleh hakim. Metode tersebut adalah interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi ekstensif, interpretasi restriktif, dan interpretasi sistematis.<sup>53</sup> Metode-metode interpretasi ini selanjutnya dijelaskan berikut.

*Pertama*, interpretasi subsumtif. Interpretasi subsumtif adalah penerapan suatu teks peraturan perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan menggunakan silogisme, yakni bentuk berpikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (*premis mayor*) untuk diterapkan kedalam hal-hal yang bersifat khusus (*premis minor*). Penafsiran substantif merupakan penafsiran dengan memasukan aturan atau teks undang-undang ke dalam perkara yang sedang diadili.

*Kedua*, interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran terhadap kata-kata atau istilah dalam undang-undang sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa yang berlaku. Penafsiran gramatikal penting karena beberapa undang-undang masih termasuk peninggalan pemerintahan Belanda.<sup>54</sup> Ketika peraturan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, masih dijumpai beberapa perbedaan kaidah

---

<sup>52</sup> Basuki Rekso Wibowo, "Pembaruan Hukum Yang Berwajah Keadilan" dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 285 Edisi Desember 2011., 12.

<sup>53</sup> Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 79.

<sup>54</sup> Seperti *Burgelijke wetboek (BW)*, *Wet Boek Van Kopenhandel (WVK)* dan *Wet Boek Strafrech (WVS)*.

bahasa. Oleh sebab itu, diperlukan interpretasi gramatikal agar isi teks undang-undang benar-benar jelas dan tepat sehingga dapat diterapkan pada suatu kasus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penafsiran gramatikal adalah penafsiran kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi ini dilakukan sebagai upaya memahami suatu teks undang-undang untuk diterapkan terhadap teks yang tidak jelas atau kurang jelas.

*Ketiga*, interpretasi historis. Interpretasi historis merupakan penafsiran makna undang-undang berdasarkan sejarah hukum ataupun sejarah terjadinya undang-undang. Setiap ketentuan perundang-undangan mempunyai sejarahnya sendiri. Oleh karena itu, hakim perlu mengetahui makna atau kalimat dalam undang-undang sesuai dengan konteks sejarah lahirnya undang-undang tersebut. Cara yang dapat digunakan oleh hakim adalah menelusuri sejarah kalimat dalam undang-undang pada saat undang-undang itu dibuat, atau dapat pula dengan cara mencari maksud dari peraturan perundang-undangan sebagaimana kehendak pembuat undang-undang.

*Keempat*, interpretasi sosiologis. Interpretasi sosiologis adalah metode penafsiran yang digunakan untuk memahami makna undang-undang dengan cara menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat. Hakim yang menggunakan metode interpretasi ini dapat menyatukan perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechts positiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechts positiviteit*). Dengan cara demikian, bunyi undang-undang tidak lagi dianggap ketinggalan zaman yang akan membuat hukum menjadi asing saat diperkenalkan kepada masyarakat.

*Kelima*, interpretasi ekstensif. Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas makna teks undang-undang. Dalam hal ini, teks dalam undang-undang tidak hanya ditafsirkan secara gramatikal, tetapi juga dengan cara memperluas maknanya sesuai dengan konteks undang-undang tersebut dan juga konteks kasus yang diadili.

*Keenam*, interpretasi restriktif. Interpretasi restriktif yaitu metode penafsiran yang dilakukan dengan cara membatasi makna teks undang-undang. Penafsiran ini dalam praktiknya lebih banyak berkaitan dengan penafsiran undang-undang yang termuat dalam bab penjelasan undang-undang, yakni yang termuat dalam penjelasan umum maupun penafsiran pasal demi pasal.

*Ketujuh*, interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran terhadap undang-undang dengan cara menghubungkan undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukum.

#### b. Metode Konstruksi

Penemuan hukum dengan metode konstruksi adalah penemuan hukum oleh hakim ketika hakim diperhadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*)<sup>55</sup>. Metode konstruksi hukum bertujuan agar putusan hakim dalam peristiwa kongkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Seorang hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*), hakim harus melakukan konstruksi antara sistem formal dan sistem materiil hukum. Berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengandung persamaan, hakim dapat membuat suatu pengertian hukum baru yang menjadi dasar pembenaran atas putusan yang akan dijatuhkan.<sup>56</sup>

Seperti halnya metode interpretasi, metode konstruksi hukum juga terbagi atas dua jenis, yaitu metode argumentasi

---

<sup>55</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 210), 74.

<sup>56</sup> Ali, *Menguak Tabir...*, 140-141.

dan metode eksposisi. Kedua jenis metode ini diuraikan berikut.

#### 1). Metode Argumentasi

Metode argumentasi adalah metode yang diterapkan oleh hakim manakala perkara yang ia periksa telah ada hukumnya, tetapi tidak lengkap. Untuk mengatasi hal ini, hakim dapat melengkapi hukum tersebut. Dalam upaya melengkapi hukum melalui metode argumentasi, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan hakim, yaitu menggunakan argumentasi *peranalogian*, argumentasi *a contrario*, dan argumentasi dengan melakukan fiksi hukum.

Metode argumentasi *peranalogian* (analogi) adalah metode yang ditempuh dengan cara memperluas perundang-undangan. Cara ini dapat dilakukan dengan menerapkan undang-undang pada peristiwa lain karena alasan kesamaan maksud (esensi) antara keduanya. Caranya, hakim menganalogikan suatu peristiwa hukum lain yang telah diatur oleh undang-undang terhadap peristiwa hukum yang *in concreto* yang belum ada pengaturannya, tetapi memiliki kesamaan esensi.<sup>57</sup>

Berbeda dengan argumentasi *peranalogian*, *argumentum a contrario* merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan makna undang-undang dengan mendasarkan pengertian pada kebalikan peristiwa kongkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa-peristiwa tertentu, maka hukum itu terbatas pada peristiwa tertentu, dan untuk peristiwa yang berada di luar hal-hal tersebut, berlaku

---

<sup>57</sup>Dalam penemuan hukum Islam, metode ini mirip dengan metode *al-qiyas* yaitu menyamakan hukum peristiwa yang belum ada nashnya dengan hukum pokok yang telah ada nashnya karena adanya persamaan '*illat* (esensi).

hukum sebaliknya. Penekanan dalam metode *argumentum a contrario*, diletakkan pada argumen sebaliknya dari yang disebutkan oleh undang-undang.

Metode konkretisasi hukum (*rechtsverwijning*) digunakan karena terkadang peraturan perundang-undangan dirasakan terlalu luas cakupannya, sehingga perlu dipersempit agar dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Metode ini digunakan hakim dalam mengkongkretkan suatu aturan hukum yang masih bersifat umum ke dalam peristiwa atau fakta hukum *in concreto*. Dalam aplikasinya, konkretisasi hukum ini dibuat sebagai pengecualian-pengecualian atau penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum, kemudian diterapkan ke dalam peristiwa atau fakta yang bersifat khusus.<sup>58</sup>

## 2). Metode Eksposisi

Metode eksposisi termasuk juga dalam ranah konstruksi hukum. Menurut Sutiyo, metode eksposisi adalah metode yang dipakai untuk menjelaskan kata-kata atau untuk membentuk pengertian hukum, dan bukan untuk menjelaskan barang<sup>59</sup>. Pengertian hukum yang dimaksud di sini adalah konstruksi hukum yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan-bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik, yang digunakan hakim pada saat hakim berhadapan dengan situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Dalam kondisi yang demikian itu, hakim harus melakukan konstruksi hukum untuk memenuhi prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya kurang jelas atau tidak ada hukumnya.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Sutiyo, *Metode Penemuan* ....., 112.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 111.

<sup>60</sup> Dalam hukum pidana dapat dicontohkan bahwa semua pengertian mengambil barang dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum (Pasal

Konstruksi hukum bertujuan agar putusan hakim dalam peristiwa kongkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Meskipun keadilan itu bersifat abstrak, nilai-nilai keadilan menghendaki untuk diperlakukan secara sama dalam peristiwa hukum yang sama.<sup>61</sup> Dalam kaitannya dengan ini, Ali dengan mengutip pendapat Rudolph Von Jhering, mengatakan bahwa syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum ada tiga, yaitu (1) konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif; (2) dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logika di dalamnya; dan (3) konstruksi itu mencerminkan sesuatu yang tidak dibuat-buat dan mampu memberikan gambaran yang jelas<sup>62</sup>.

## 2. *Sociological Jurisprudence*

Model penalaran ini berangkat dari keluarga sistem *common law*, khususnya Amerika Serikat<sup>63</sup>, namun kelebihanannya dalam mengawinkan antara ketertutupan logika Positivisme Hukum dan keterbukaan logika Mazhab Sejarah telah menarik perhatian banyak penstudi hukum di lingkungan keluarga sistem *civil law*.<sup>64</sup>

---

362 KHP), sehingga segala perbuatan apapun namanya; maling, copet, nyolong dan sebagainya, apabila dengan maksud untuk memiliki maka perbuatan itu disebut mencuri. *Ibid.*, 113.

<sup>61</sup>Salah satu contoh konstruksi hukum adalah kawin sirri, kawin di bawah tangan, kawin kampung dan sebagainya, yang semuanya menunjukkan maksud perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan nikah sebagaimana pasal 6 KHI. Apapun istilah yang berkembang di masyarakat, semua itu menunjuk pada maksud perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang tidak resmi (PPN KUA).

<sup>62</sup>Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesi, 2008), 113.

<sup>63</sup> Pascapositivisme, perkembangan yang cukup revolusioner terjadi sejak awal abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya aliran *Sociological jurisprudence* yang dicetuskan oleh Eugen Erlich dan Roscoe Pound. Mereka mencoba menarik ilmu hukum dari ranah formal positivistik ke arah pemikiran yang hendak memahami hukum dan ilmu hukum dalam konteks sosial. Selanjutnya lihat Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 55.

<sup>64</sup> Lihat Shidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 19

Bagi sistem hukum Indonesia, yang sebagian masih disokong oleh unsur hukum adat, dan hukum Islam bahwa penempatan model penalaran *Sociological Jurisprudence* dapat membuka arah pemahaman yang lebih holistik. Sebagaimana dikatakan Soetandyo Wingjosoebroto hukum adat sebenarnya hanya akan menemukan kelestariannya kalau diperlakukan sebagai *common law*.<sup>65</sup>

Hal di atas menunjukkan bahwa konteks keIndonesiaan, cara pandang *Sociological Jurisprudence* yang dijiwai keluarga sistem *common law* merupakan kerangka berpikir yang tepat karena terhindar dari perspektif satu arah jika hanya menggunakan Positivisme Hukum yang identik sebagai model penalaran dari keluarga sistem *civil law*. Sifat ekletisnya teori ini menjadikan alasan penulis menggunakan teori *Sociological Jurisprudence* dalam menjawab permasalahan perubahan penerapan hukum putusan perceraian *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo, yakni penerapan hukum putusan perceraian dari kasus yang bersifat khusus menjadi penerapan hukum putusan perceraian bentuk cerai talak dan cerai gugat sebagai kasus yang bersifat umum (selanjutnya penulis menyebutnya sebagai kasus perceraian biasa).

Model penalaran *Sociological Jurisprudence* sebagaimana penjelasan di atas bertolak dari dua aliran filsafat hukum yakni aliran Positivisme Hukum yang lebih mengedepankan peraturan perundang-undangan, dan aliran filsafat hukum yang mengedepankan kepentingan masyarakat atau fakta-fakta empiris. Dari model penalaran *Sociological Jurisprudence* tersebut Sidharta menyatakan penalaran tersebut menunjukkan adanya tujuan kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>66</sup> Lebih lanjut beliau menguraikan bahwa untuk mengetahui tujuan kemanfaatannya

---

<sup>65</sup>Soetandyo Wingjosoebroto, *Dari hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 134-135, 201-202

<sup>66</sup> Lihat Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum.....*, 216

dicapai dengan pendekatan nondoktrinal-induktif melalui metode penelaahan fakta-fakta empiris, sedangkan kepastian hukum diperoleh dengan pendekatan doktrinal-deduktif melalui sumber hukum otoritatif, baik berupa yurisprudensi yang mempunyai kekuatan mengikat berkat penerapan asas preseden, maupun dalam bentuk perundang-undangan.<sup>67</sup>

Adapun *Sociological Jurisprudence* dalam penelitian ini digunakan penulis sebagai acuan kerangka berpikir untuk menganalisis pola penalaran hakim dalam merubah hukum ketiga kasus tersebut, karena mazhab ini menggunakan pola penalaran yang paling komprehensif dibandingkan model penalaran hukum klasikal lainnya. Sebagaimana pandangan aliran ini hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga membuat hukum (*judge made law*).<sup>68</sup> Hakim harus menyadari sepenuhnya bahwa putusan-putusannya tidak hanya diproyeksikan dalam menerapkan perundang-undangan belaka, tetapi lebih dari itu hakim perlu memperhatikan agenda yang lebih besar.

Agenda yang dimaksud adalah menjadikan putusan-putusan hakim tersebut sebagai jembatan dalam mewujudkan ketertiban di masyarakat agar dapat membawa perubahan dalam dinamika masyarakat menuju dinamika yang lebih konstruktif. Ketertiban di sini perlu dimaknai sebagai sebuah keadaan yang seimbang, yaitu setiap kepentingan di masyarakat terakomodasi secara patut. Di sini letak dan peran hukum yang sebenarnya sehingga keberadaanya bukan lagi sebuah entitas mati yang apriori,

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Kedua aliran tersebut diberikan ruang gerak oleh pasal 28 UU No. 4 tahun 2004 dengan tujuan untuk mengantisipasi segala kekurangan, ketidakjelasan maupun untuk menutupi “lubang” yang mungkin terdapat dalam setiap prasarana undang-undang dan peraturan. Lebih lanjut metodologi yang digariskan dalam UU No. 4 Tahun 2004, sengaja pula dirumuskan dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bunyinya “*Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusnya sesuai dengan rasa keadilan*”, Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kecana, 2008), 34.



melainkan entitas yang dinamis dan responsif terhadap tuntutan zaman.

Konsekuensi logis dari aliran ini terhadap sistem kerja pengadilan (yang di wakili oleh hakim) antara lain: (1) terdapat penghargaan terhadap *the living law*, (2) memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutus perkara berdasarkan *the living law*, atas dasar paham hukum non-positivistik; (3) melakukan inventarisasi putusan-putusan hakim yang memuat nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sebagai pencerminan kesadaran hukumnya dan sebagai bahan hukum primer dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta sebagai bahan pertimbangan hakim lainnya; (4) mengembangkan lembaga peradilan yang dapat menjadi badan penyelesaian sengketa hukum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah; dan (5) mengembangkan *public control* terhadap produk perundang-undangan.<sup>69</sup>

Berkenaan dengan penerapan hukum, Atmadja dengan mengutip Roscoe Pound mengemukakan tiga langkah atau tahapan yang perlu dilakukan oleh para hakim dalam memutus perkara. *Pertama*, menemukan kaidah atau norma hukum dari sekian banyak kaidah atau norma hukum dalam sistem hukum. Hakim akan menetapkan norma hukum yang paling relevan dengan konteks kasus. *Kedua*, menafsirkan norma hukum yang dipilih atau ditetapkan dalam penyelesaian kasus yang diperiksa dan diadili. Pada tahap ini diperlukan keahlian dalam menafsirkan hukum sebagaimana yang dikenal dan dikembangkan dalam ilmu hukum. Menafsirkan adalah memberi makna atau arti yang tepat terhadap teks-teks undang-undang. Ketiga, menerapkan norma hukum terhadap sengketa yang sedang diadili. Hakim akan mengemukakan argumentasinya sebagai landasan dari putusan yang diambil.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis* (Malang: Setara Press. 2013), 99.

Senada dengan pendapat di atas, Manan berpendapat bahwa peran hakim dalam membuat hukum baru, hukum buatan hakim (putusan hakim *in-concreto*) ketika tidak menemukan aturan hukumnya dalam perundang-undangan atau aturannya ditemukan tetapi diatur secara umum saja hendaknya harus dititikberatkan pada tujuan dan tafsiran filosofis. Tafsiran filosofis yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit dan sekadar berperan menjadi “mulut” undang-undang serta tidak berperan sebagai makhluk yang tidak bernyawa (*bouche de la loi*). Hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama seperti dalam rumusan peraturan perundang-undangan, sebab tidak selamanya yang sesuai dengan hukum itu merupakan keadilan (*justice*).<sup>71</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, hakim Peradilan Agama harus mampu berperan menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum-hukum baru dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, dan tempat.<sup>72</sup> Selain itu pula, hakim Peradilan Agama harus mampu berperan agar hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Apabila disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, beberapa ketentuan yang diatur dalam kitab-kitab fikih sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di samping itu, banyak pasal dalam hukum positif yang belum jelas dan masih harus ditafsirkan kembali agar dapat diaplikasikan secara kongkret. Itulah sebabnya, hakim dituntut untuk berijtihad melakukan penemuan hukum sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Dalam menciptakan hukum baru

---

<sup>71</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 300-301.

<sup>72</sup> Dalam hukum konvensional, metode penafsiran dibagi empat, yaitu: interpretasi gramatikal, sistemis, historis, dan teologis. Di samping itu, ada juga interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum Sebuah Pengantar*, Cet. II (Yogyakarta: Liberty, 2001), 56-57.

tersebut, para hakim harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar hukum yang diciptakan itu dihargai dan dipatuhi oleh pencari keadilan pada khususnya dan oleh masyarakat pada umumnya.<sup>73</sup>

Dengan demikian pada tataran *middle range theory* model penalaran yuridis dari aliran mazhab *Sociological Jurisprudence* adalah pilihan yang dianggap tepat untuk menganalisis putusan hakim sebagai objek telaah dalam disertasi ini. Kerangka berpikir dari aliran mazhab *Sociological Jurisprudence* tersebut menjadi acuan pendekatan penulis untuk menjelaskan dan menguraikan argumentasi yuridis atau penalaran hukum yang dilakukan hakim, terhadap perubahan penerapan hukum putusan perceraian *syiqaq khuluk* dan *li'an* di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo.

### 3. Teori Perubahan Penerapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Teori ini dimanfaatkan untuk menjawab dan menganalisis faktor-faktor terjadinya perubahan dalam penerapan hukum putusan kasus *syiqaq, khuluk* dan *li'an* di Peradilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Karena tak dapat disangsikan bahwa problem yang dihadapi oleh setiap generasi tidak selalu sama termasuk di dalamnya situasi dan kondisi yang ada.<sup>74</sup> Kondisi yang demikian berpeluang terhadap terjadinya proses sosial yang spesifik bagi setiap generasi dalam suatu masyarakat. Bahkan, hukum Islam sendiri menganjurkan proses sosial melalui suatu perubahan, baik dalam wujud imitasi, asimilasi, adaptasi, inovasi, maupun dalam penyerapan yang selektif.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, 303-304.

<sup>74</sup> J. Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (USA; Oxford University Press, 1964), 110-111.

<sup>75</sup> Lihat M. Iqbal, *The Rekonstruction of religious Thought in Islam*, yang dikutip oleh Abdillah dalam *Dialektika hukum Islam....*, 64.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat muslim dapat pula berakibat pada terjadinya perubahan penerapan hukum Islam. Perubahan yang terjadi mengindikasikan bahwa secara faktual, hukum tetap kontekstual dan aktual karena terpelihara secara menyakinkan sesuai dengan tuntutan waktu, ruang, situasi dan kondisi publiknya. Hukum Islam yang dimaksud di sini hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* yang diatur dalam kitab-kitab fikih. Bentuk-bentuk hukum ini sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, khususnya pada masa sekarang. Ketidakmampuan itu disebabkan masalah yang terjadi saat ini tidak sama dengan masalah yang terjadi pada saat kitab-kitab fikih itu ditulis oleh para fuqaha.

Perubahan hukum secara dinamis menjadi sebuah keharusan agar hukum dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan zaman. Perubahan hukum pada hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa dalam masyarakat serta pengaturannya di dalam hukum formal.<sup>76</sup>

Al-Jauziyah berpendapat bahwa terjadinya perubahan penerapan hukum Islam secara mapan selaras dengan perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi dan tradisi<sup>77</sup>. Pemikirannya ini diformulasikan kedalam rumusan kaidah bahwa;

تَغْيِيرُ الْفَتَاوَى بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَرْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَادَةِ

“Perubahan fatwa itu terjadi selaras dengan perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi (niat), dan tradisi”.<sup>78</sup>

Senada dengan Al-Jauziyah, Al-Maraghi menyatakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan

---

<sup>76</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 51.

<sup>77</sup>Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwāqī'in* ....., 3.

<sup>78</sup>*Ibid*

manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu dan tempat.<sup>79</sup> Ridha menyampaikan pula hal yang sama. Menurut Ridha, sesungguhnya hukum (penerapannya) itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi.<sup>80</sup> Pendapat para ahli ini menunjukkan bahwa ketika suatu aturan itu dibuat dan kemudian kebutuhan aturan itu tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, sebaiknya aturan tersebut diperbarui sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu dan tempat hukum itu diberlakukan.

Berkaitan dengan prinsip perubahan penerapan hukum, Al-Qardhawi menambahkan faktor-faktor penentu perubahan hukum ke dalam teorinya. Menurutnya, perubahan hukum dapat disebabkan oleh adanya perubahan informasi (maklumat), perubahan kebutuhan manusia, perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik, perubahan pendapat dan pemikiran, serta musibah (ujian dan cobaan).<sup>81</sup> Faktor-faktor yang dikemukakan Al-Qardhawi hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Soekamto. Mengenai faktor penentu perubahan, Soekamto berpendapat bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan. Faktor tersebut antara lain: sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan sebagainya.<sup>82</sup>

Konsep teori sebagaimana diuraikan di atas memberikan keleluasaan kepada seorang hakim sebagai pelaksana kekuasaan

---

<sup>79</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz, V, (Mesir: Maṭba'ah al-Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalībī, t.t), 187.

<sup>80</sup> Muhammad Rasyīd Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz, III, (Cairo: Dar al-Firkal al-Arabi, 1987), 118.

<sup>81</sup> Yūsuf Al-Qaraḍawī, *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*. Terj., Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Al-Kautsar, 2009), 20.

<sup>82</sup> Soerjono Soekamto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Citra Aditya, 1991), 17.

kehakiman untuk menyelesaikan atau menemukan hukum peristiwa konkret atau konflik yang sedang dihadapinya. Hasil penerapan hukum oleh hakim dapat dikatakan sebagai hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu, hasil putusan hukum oleh hakim merupakan sumber hukum.<sup>83</sup>

Demikian pula hakim di Pengadilan Agama harus mampu menjadi seorang mujtahid dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat muslim. Untuk dapat menyelesaikan pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, melalui proses peradilan seorang hakim berkewajiban mencari dan menemukan hukum secara objektif untuk diterapkan atau di-*toepassing* memutus perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak,<sup>84</sup> baik melalui hukum tertulis yang termuat dalam hukum materiil maupun hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat atau *living law*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam melakukan tugas pokoknya hakim harus mampu menggali dan mengeluarkan hukum dari sumbernya. Hal ini sejalan dengan pendapat Efendi bahwa hakim harus mampu melakukan ijtihad atau mengeluarkan hukum dari sumbernya, sekaligus mampu untuk menerapkannya. Seorang hakim harus mampu melakukan *ijtihad istinbathy* dan juga *ijtihad tathbiqy*<sup>85</sup>. *Ijtihad istinbathy* adalah kegiatan ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Sebaliknya, *ijtihad tathbiqy* adalah kegiatan ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum hasil temuan imam mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Dalam hal ini, tampak adanya upaya pengerahan daya ijtihad, namun tidak

---

<sup>83</sup>*Ibid.*, 64.

<sup>84</sup>M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 820.

<sup>85</sup>Satria Efendi M. Zein, 1993, "Ijtihad dan Hakim Pengadilan Agama" dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 10 Tahun IV, 41-51.

sampai menghasilkan hukum yang baru atau orisinal serta tidak menggunakan dalil *syara'* yang *mu'tabar* sebagai bahan rujukan, tetapi hanya menunjuk kepada hukum-hukum yang telah ditemukan mujtahid terdahulu.<sup>86</sup>

Uraian di atas sangatlah jelas bahwa betapa besar peranan hakim Peradilan Agama dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan keputusan atas segala permasalahan hukum, dan tidak hanya sekedar menerapkan hukum tertulis, tetapi juga dibebani tugas untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan kebenaran. Hal ini harus dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara rumah tangga yang terjadi di masyarakat sesuai dengan tuntutan perubahan hukum agar tercipta kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam konteks kajian hukum, penelitian ini bersifat kajian hukum doktrinal karena mengkaji norma positif sebagai acuan penyelesaian suatu kasus kongret. Akan tetapi, di sisi lain juga penelitian ini menggunakan kajian nondoktrinal untuk melihat lingkup fakta yang terjadi yang sifatnya kasuistik.<sup>87</sup> Artinya, objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah hukum yang dikonsepskan sebagai simbol yang penuh makna<sup>88</sup> sebagai hasil

---

<sup>86</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqh, jilid 2* (Jakarta : Kencana, 2008), 266.

<sup>87</sup> Soetandyo Wingjosoebroto, membagi tipologi penelitian hukum menjadi dua, yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum nondoktrinal. Lihat Soetandyo Wingjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002), 148. Lihat Shidarta, *Pemetaan Aliran-aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*. Dalam Sulistyowati Irianto *at.all* (Ed.) *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 162

<sup>88</sup> Dalam kajiannya terdapat lima konsep hukum. *Pertama*, hukum yang dikonsepskan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan

konstruksi mental manusia (hakim) yang termanifestasikan dalam bentuk putusan. Dalam hal ini, pengkajian perubahan penerapan hukum putusan perceraian *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*, dilakukan melalui pengkajian dokumen Putusan Perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo Tahun 2006-2009. Karena penelitian ini hanya menelaah dokumen, maka penelitian ini termasuk dalam jenis kajian kepustakaan (*library research*).

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk menguraikan objek yang dikaji dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis-*sociolegal*.<sup>89</sup> Pendekatan yuridis digunakan untuk penelitian

---

menjadi bagian inheren sistem hukum alam, atau bahkan tak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supranatural sifatnya. *Kedua*, hukum dikonsepkan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit sebagai suatu sumber kekuasaan politik, tertentu yang berlegitimasi, atau yang lebih dikenal sebagai hukum nasional atau hukum negara. *Ketiga*, hukum dikonsepkan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim *in concreto* dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim menyelesaikan kasus atau perkara, yang berkemungkinan juga berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya. *Keempat*, hukum dikonsepkan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. *Kelima*, hukum dikonsepkan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat. Dari kelima konsep hukum yang telah dijelaskan tersebut maka dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah konsep ketiga. Lihat Wingjosoebroto, *Hukum Paradigma...*, 148. Lihat pula M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum...*, 17.

<sup>89</sup>Pendekatan *socio-legal* adalah kajian terhadap hukum, dengan menggunakan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial yang bersifat interdisipliner. Lihat sulistyowati Irianto dkk., (ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 173-175. Lihat pula M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 17. *Socio-legal* merupakan pendekatan baru di dalam ilmu hukum pendekatan ini dimaksudkan untuk mengedepankan keseimbangan analisa ilmu hukum dan ilmu –ilmu sosial sebagai upaya untuk mencapai tujuan hukum yang berkeadilan. Lihat Esmi Warasih dkk, *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Socio-Legal*, Ed. Tutut Ferdiana, Mahita Paksi, Rian Achmad Perdana, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 3-4



hukum hasil putusan hakim yang *in-concreto* yaitu penerapan hukum putusan perceraian kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*. dan pendekatan *sociolegal* memusatkan perhatian pada pola penalaran hakim terhadap perubahan dan perkembangan yang muncul dalam menerapkan hukum dari kasus yang khusus menjadi kasus yang umum, yaitu perubahan penerapan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* menjadi kasus cerai talak dan cerai gugat di peradilan Agama se-Provinsi Gorontalo.

Teori yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri dari tiga tataran teori. Pada tataran *grand theory* ditampilkan teori dibidang penemuan hukum (*legal reasoning*). Tataran *grand theory* ini memberi dasar pemahaman tentang penalaran hakim dalam memutuskan perkara perceraian, khususnya perceraian kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* di Peradilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Pada tataran *middle range theory*, dipilih suatu kerangka orientasi berpikir yuridis dari salah satu aliran filsafat hukum, yaitu *sociological jurisprudence* yang digunakan untuk menganalisis argumentasi atau pola penalaran yang digunakan hakim dalam merubah putusan ketiga kasus yang menjadi objek kajian dalam disertasi ini. Sedangkan pada tataran *applied theory* dipilih teori perubahan penerapan hukum dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Teori ini untuk menganalisis terjadinya dinamika perubahan hukum, yang secara dinamis sesuai dengan situasi, kondisi, dan tuntutan perubahan zaman, yang berakibat pada perubahan penerapan hukum putusan kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* di Pengadilan Agama se-Wilayah Provinsi Gorontalo.

### 3. Sumber Data

Objek kajian dalam disertasi ini adalah putusan hakim yang dijadikan sebagai norma hukum. Oleh karena itu, pengambilan sumber data harus didasarkan pada ketersediaan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>90</sup>

Berkenaan dengan sumber data penelitian, Mertokusumo menyatakan bahwa penyempurnaan data (bahan hukum) yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dapat dilakukan melalui penelitian lapangan. Data lapangan ini dikumpulkan melalui wawancara yang sifatnya menguatkan (sebagai pelengkap)<sup>91</sup>. Informan yang diwawancarai antara lain: para hakim, pejabat serta aparat Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo, dan para ahli hukum sebagai nara sumber. Data hasil wawancara ini digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari sumber dokumen.

Sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian ini mengumpulkan sumber data berupa bahan hukum yang diperoleh melalui kajian pustaka. Bahan hukum tersebut dibedakan ke dalam tiga kelompok, yakni data berupa bahan hukum primer, data berupa bahan hukum sekunder, dan data berupa bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas (1) Peraturan Perundang-Undangan di Peradilan Agama yang berkaitan dengan hukum acara yakni RBG/ HIR; (2) UU no 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman; (3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (5) PP. No 9 Th. 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974; (6) Instruksi Presiden No.1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; (7) Yurisprudensi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini; (8) Risalah resmi, Peraturan, Surat Edaran dan Fatwa Mahkamah Agung yang

---

<sup>90</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

<sup>91</sup>Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak Tahun 1942* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, ), 30.

ada hubungannya dengan penelitian yang antara lain: SEMA No.1 Tahun Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, SEMA No. 9 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan. Mahkamah Agung, Buku II Edisi revisi 2010, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; dan (9) Putusan-Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian dari Tahun 2006-2009.

Salah satu bahan hukum primer penelitian ini, yang merupakan putusan-putusan hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama diambil dari tiga pengadilan tingkat pertama di Wilayah se-Provinsi Gorontalo. Dipilihnya wilayah penelitian ini didasarkan pada dua pertimbangan. *Pertama*, pertimbangan teknis, yakni peneliti berdomisili di wilayah tempat dilaksanakannya penelitian ini sehingga dari segi waktu dan biaya pelaksanaannya mudah dilakukan. *Kedua*, sistem kelembagaan dan yuridiksi di Indonesia pasca-Undang-Undang No. 7/1989 mempunyai corak dan karakteristik yang sama.

Kesamaan corak dan karakteristik PA di Indonesia menunjukkan bahwa di manapun penelitian ini dilakukan, selama masih berada di Indonesia, subjek penelitiannya dapat saling mewakili, termasuk populasi dalam penelitian ini. Populasi yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Gorontalo yang berada Kota Gorontalo; Pengadilan Agama Limboto yang berada di Wilayah Kabupaten Limboto; dan Pengadilan Agama Tilamuta yang berada di Wilayah Kabupaten Boalemo. Ketiga Pengadilan Agama tersebut termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Gorontalo. Populasi tersebut diharapkan dapat menggambarkan pemikiran perubahan hukum terhadap realitas pengambilan putusan perkara perceraian kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*.

Untuk memperoleh data perkara dari tiga kasus di atas, diambil dari produk putusan perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, mengingat putusan perceraian yang dihasilkan pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo sejak berdirinya hingga sekarang jumlahnya cukup banyak, objek penelitian dibatasi pada putusan yang dihasilkan selama kurun waktu 2006-2009.

Penetapan pengambilan objek penelitian antara tahun 2006 sampai 2009 didasarkan pada pertimbangan bahwa pada tahun 2006 terjadi pemisahan Wilayah Pengadilan Agama Gorontalo dari Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado, dan tahun itu pula merupakan awal pendirian Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini bersumber dari: (1) buku-buku yang membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan fokus penelitian; (2) hasil-hasil penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan bahasan penelitian; (3) Hasil kesimpulan seminar, makalah, artikel yang berhubungan langsung dengan kajian disertasi; (4) jurnal hukum yang terkait langsung dengan tulisan disertasi; (5) bahan dari internet yang menyangkut materi-materi yang berkaitan dengan bahasan disertasi ini. (6) Wawancara hakim di Tiga Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Data wawancara ini sebagai data pendukung untuk mengkaji dokumen putusan perceraian .

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus,-kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi<sup>92</sup>. Teknik pengambilan data dengan teknik dokumentasi adalah teknik pengambilan data dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang sudah ada. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah putusan yang terdapat di tiga pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Data lainnya diambil dari berbagai sumber tulisan<sup>93</sup> yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian, baik data primer, sekunder, maupun tersier.

Seperti yang sudah dikemukakan, tidak semua kasus perceraian yang terdapat di tiga tempat yang dijadikan lokasi penelitian dianalisis dalam penelitian ini. Kasus perceraian yang dianalisis dibatasi dalam rentang tahun 2006 sampai 2009. Dengan demikian, secara tidak langsung peneliti hanya menggunakan sampel pada tahun tersebut. Teknik pengambilan sampel seperti ini dinamakan *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Artinya, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik data yang dibutuhkan.<sup>94</sup> Data yang dibutuhkan adalah putusan perceraian yang berkarakteristik kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*.

Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan adalah wawancara. Data yang dikumpulkan dari wawancara ini dimaksudkan untuk mendukung data yang diperoleh dari studi dokumentasi. Beberapa informan yang diwawancarai guna mendapatkan data pendukung adalah sebagai berikut:

---

<sup>92</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 180.

<sup>93</sup> Rianto Adi memakai istilah studi dokumen/*literature study*. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 61.

<sup>94</sup> Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data putusan yang memiliki karakteristik *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*. Jadi data yang diambil hanyalah data-data yang memiliki karakteristik putusan *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*. Lihat Masri Singarimbun terjemah Arif Munandar Riswanto dkk., *Metode Penelitian Survei* (Yogyakarta: LP3ES, 1989), 169.

Mohamad Yamin	Ketua Pengadilan Agama Gorontalo
Saerodji	Wakil ketua Pengadilan Agama Limboto
Nurhudayah	Ketua Pengadilan Agama Tilamuta
Burhanudin Mokodompit	Hakim Pengadilan Agama Gorontalo
Mukasipa	Hakim Pengadilan Agama Limboto
Nur Rohman	Hakim Pengadilan Agama Gorontalo
Mohamad H. Daud	Hakim Pengadilan Agama Gorontalo
Mawardi	Hakim Pengadilan Agama Tilamuta

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif.<sup>95</sup> Analisis kualitatif adalah metode analisis yang memusatkan perhatian pada kata-kata dan kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks. Dalam penelitian ini, data kualitatifnya berupa putusan perceraian, baik putusan cerai talak maupun putusan cerai gugat. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data adalah sebagai berikut.

- (1) Membaca dokumen-dokumen yang telah didapatkan dari lapangan. Pembacaan dilakukan berulang-ulang dengan maksud untuk mendapatkan data yang akan dianalisis.
- (2) Mengidentifikasi sekaligus mengelompokkan data. Pengelompokkan data dilakukan melalui dua tahap. *Pertama*, data berupa putusan cerai talak disendirikan. Demikian pula dengan data berupa putusan cerai gugat. *Kedua*, setelah data

---

<sup>95</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 244.

dikelompokkan berdasarkan jenis putusan, pada setiap jenis putusan akan dikelompokkan putusan yang termasuk kategori *syiqaq*, *khuluk*, dan *lian*,

- (3) Membahas data yang sudah dikelompokkan baik berdasarkan jenisnya maupun berdasarkan kategorinya. Pada tahap ini teori yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya akan diaplikasikan. Tahap ini termasuk juga dalam tahap analisis isi (*content analysis*).<sup>96</sup> Selain analisis isi, dilakukan pula analisis preskriptif (argumentasi hukum terhadap peristiwa hukum).<sup>97</sup>
- (4) Menyimpulkan hasil pembahasan. Kesimpulan terdiri atas dua, yaitu kesimpulan untuk hasil pembahasan pada setiap rumusan masalah dan kesimpulan umum yang merupakan gabungan dari simpulan-simpulan sebelumnya.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika format keseluruhan disertasi ini adalah satu kesatuan pemikiran dari suatu penelitian. Keseluruhan pemikiran bertumpu pada kerangka dasar penelitian atau yang disebut sebagai proses pendahuluan yang dikemas dalam *Bab Satu*. Dalam pendahuluan, peneliti mendeskripsikan latar belakang pemikiran tentang pentingnya pengkajian putusan Pengadilan Agama sebagai salah satu sumber hukum yang dipegang oleh masyarakat muslim untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Dalam penelitian ini masalah dikhususkan pada perceraian kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* yang merupakan bagian dari problema rumah tangga sering dihadapi masyarakat muslim. Akan tetapi dalam penerapan hukumnya di Peradilan Agama telah mengalami perubahan. Problema inilah yang menimbulkan kegelisahan akademik pada diri peneliti. Dari problema tersebut, dirumuskan masalah dan metode penelitian, serta

---

<sup>96</sup> Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2013), 12

<sup>97</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 35

kerangka teoritik yang digunakan sebagai dasar pijakan bagi keseluruhan proses pengkajian.

Pada bab dua, peneliti memaparkan kedudukan dan karakteristik hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*. Pembahasan ini penting dengan tujuan sebagai pengantar untuk memberi kejelasan hukumnya dalam peraturan perkawinan di Peradilan Agama, serta untuk memahami karakteristik dari masing-masing kasus tersebut sehingga ditemukan perbedaannya dengan kasus perceraian lainnya. pembahasan ini dibutuhkan sebagai pedoman hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Peradilan Agama.

Pada kajian selanjutnya, yaitu bab tiga, empat dan lima peneliti membahas kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dan perubahan penerapan hukumnya pada putusan perkara perceraian yang teridentifikasi dari perkara cerai gugat maupun cerai talak di Pengadilan Agama se-Propinsi Gorontalo dari Tahun 2006-2009. Pada bab-bab tersebut dijelaskan penerapan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*, sehingga diperoleh kejelasan pola penalaran hakim dalam melakukan perubahan penerapan hukum pada ketiga kasus tersebut.

Pada bab tujuh adalah membahas faktor-faktor terjadinya perubahan penerapan hukum putusan kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* di Pengadilan Agama se-Propinsi Gorontalo. Bab ini lebih jauh mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan hukum ketiga kasus tersebut dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menetapkan putusannya yang problematikanya menggambarkan keterkaitan dengan kemerdekaan/kebebasan dan profesionalisme hakim dalam memutuskan perkara.

Pada bab terakhir, yakni bab delapan, peneliti menghadirkan simpulan-simpulan dan saran-saran atas perubahan penerapan hukum pada putusan kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* di Pengadilan Agama se-Propinsi Gorontalo.



## **BAB VIII PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Kesimpulan di bawah ini difokuskan pada hasil pembahasan dari tiga rumusan masalah yaitu;

1. Karakteristik dan Kedudukan Hukum *Syiqaq*, *Khuluk* dan *Li'an*.

Berdasarkan yuridis formal bahwa kedudukan hukum *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* yang terkodifikasi ke dalam kitab-kitab fikih telah terakomodasi ke dalam UUPA No.7/1989 dan KHI. Peraturan tersebut dijadikan pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian bagi umat Islam di Peradilan Agama. Perceraian *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* sebagai hukum Islam memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda dengan cerai gugat dan cerai talak pada umumnya (biasa). Karakteristik itu adalah sebagai berikut:

- (1) Pada kasus *syiqaq*, gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau oleh istri, dengan catatan alasan perceraian adalah perselisihan antara suami istri telah terjadi terus-menerus, dalam waktu lama, tidak terselesaikan, terjadi *dharar*, dan salah satu pihak tidak setuju melakukan perceraian, keduanya saling mempertahankan kebenaran argumen. Karena keadaannya demikian, hakim mengangkat hakim dari pihak keluarga, baik suami maupun istri.
- (2) Pada kasus *khuluk*, gugatan perceraian diajukan oleh istri dengan beberapa alasan, misalnya, suami mengalami cacat fisik, buruk akhlaknya atau tidak memenuhi kewajibannya sehingga istri khawatir akan melanggar hukum Allah. Karena kehendak bercerai datang dari pihak istri, istri memberikan harta kepada suami sebagai penebus diri dari putusanya ikatan perkawinan. Harta tebusan (*iwadl*) yang diberikan kepada suami didasarkan pada kesepakatan suami. Dengan uang

tebusan tersebut istri menerima hak talak dari suami. Putusan *khuluk* dalam praktik lainnya berbentuk pelanggaran talik talak. Baik *khuluk* maupun taklik talak, kedua-duanya memiliki karakteristik yang sama yaitu adanya pembayaran iwadl. Meskipun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan. Pada perceraian bentuk *khuluk*, jumlah *iwadl* yang diberikan tergantung kesepakatan suami, dan penerima adalah suami. Pada bentuk taklik talak, jumlah *iwadl* sudah ditentukan dan penerimanya adalah panti sosial. Setelah itu, yang memutuskan perceraian adalah hakim.

- (3) Pada kasus *li'an*, gugatan perceraian diajukan oleh suami sesuai dengan UU Pengadilan Agama. Gugatan suami didasarkannya pada tuduhan bahwa istrinya melakukan zina atau suami tidak mengakui anak yang dilahirkan istri sebagai anaknya. Dalam penyelesaian kasus ini hakim meminta penggugat untuk menghadirkan empat orang saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Apabila penggugat(suami) tidak dapat menghadirkan saksi dan tergugat (istri) menolak tuduhan tersebut, hakim memutusnya dengan cara *li'an*. Dalam hal ini, suami bersumpah atas nama Allah bahwa tuduhannya benar dan ia siap mendapat laknat apabila tuduhannya salah. Demikian pula dengan istri yang dituduh berzina. Istri bersumpah atas nama Allah dan menyatakan apa yang dituduhkan oleh suaminya tidak benar, dan ia siap menerima laknat apabila pernyataannya salah. Setelah itu, hakim memutuskan hubungan perkawinan keduanya dengan talak *bain kubra*. Setelah putusan hakim jatuh, suami istri resmi berpisah untuk selama-lamanya dan anak yang diingkari bernasab kepada ibu.
2. Penerapan Hukum Putusan *Syiqaq*, *Khuluk* dan *Li'an* di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo.

Melalui bantuan *grand theory* dan *midle range theory* dapatlah dipahami bahwa penalaran hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan tiga kasus tersebut secara kongkret masih berpegang pada ilmu hukum dogmatis (sebagai ilmu praktis).

Khusus dalam rangka aktivitas penalaran hukum memecahkan suatu problema hukum (kasus) kongkret, dengan sendirinya sebagai ilmu hukum dogmatis kedekatan acuannya dengan sistem hukum positif. Penalaran hukum pada tataran ilmu hukum dogmatis terfokus pada pembentukan struktur kasus dan struktur aturan, selanjutnya tatkala memasuki keharusan menghubungkan antara struktur aturan dan struktur kasus tersebut, terkait dengan metode inferensial yang akan digunakan, dari sisi ini ilmu hukum dogmatis (sebagai ilmu praktis) tidak dapat bekerja sendiri. Jika harus dipaksakan bekerja sendiri maka akan menjadi penerapan hukum model penalaran positivisme hukum, dimana hakim tinggal menerapkan saja aturan yang sudah ada di dalam undang-undang. Dengan demikian ilmu hukum dogmatis harus bekerja sama dengan ilmu-ilmu lain dalam tataran meta-ilmu secara interdisipliner (teori hukum). pada tataran ini bahwa aksentuasi peran teori hukum dalam aktivitas penalaran hukum tidak mungkin bebas nilai. Olehnya itu diperlukan refleksi dari filsafat hukum guna menemukan muatan nilai-nilai tersebut. Dalam artian filsafat hukum dapat memberi peran yang sangat berarti bagi kegiatan penalaran hukum. Sebagaimana dalam penerapan hukum ketiga kasus dalam penelitian ini, dengan bantuan teori penemuan hukum dan juga *sociological jurisprudence* sebagai suatu aliran mazhab dari filsafat hukum digunakan untuk menganalisis pola penalaran hakim dalam memutuskan ketiga kasus tersebut. Berdasarkan hasil analisis maka dapat dijelaskan bahwa penalaran hukum yang dilakukan hakim masih berpedoman pada penalaran positivisme hukum yakni, hakim dalam penerapan hukum masih berpegang pada teks undang-undang. Akan tetapi apabila tidak menemukan hukumnya hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum (teori penemuan hukum). Metode interpretasi digunakan hakim setelah peristiwa hukumnya dikonstatasi atau dibuktikan. Setelah itu hakim mengonstitusi peristiwanya dengan melakukan penafsiran untuk mengetahui makna rumusan pasal dalam undang-undang. Metode konstruksi hukum digunakan hakim

untuk menguraikan kekaburan dan ketidakpastian perundang-undangan. Dengan cara demikian hakim akan mengetahui peraturan itu dapat digunakan atau tidak pada peristiwa konkret dari ketiga kasus tersebut. Pada metode interpretasi dan konstruksi agar tidak bebas nilai, maka dibutuhkan pendekatan filsafat hukum guna mendapatkan nilai tersebut, dengan demikian pola penalaran dari aliran *sociological jurisprudence* digunakan hakim untuk mencapai putusan yang memenuhi tujuan hukum yakni nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Pola penalaran model *sociological jurisprudence* bukan saja melihat sisi kepastian hukum akan tetapi bersamaan dengan kemanfaatan hukum (simultan). Dengan demikian dalam penerapan ketiga kasus ini, pola penalaran hukum hakim tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, akan tetapi juga memperhatikan pencapaian nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan.

3. Perubahan Penerapan Hukum Putusan *Syiqaq*, *Khuluk* dan *Li'an*. Konteks penerapan hukum di Pengadilan Agama tidak lepas dari tradisi keluarga sistem *civil law*. Sistem hukum tersebut tidak dapat menghindari penekanan dari penerapan atas norma-norma positif, lebih mengedepankan peraturan perundang-undangan (penalaran Positivisme hukum). Akan tetapi dalam rangka menjawab kebutuhan pencari keadilan tentulah putusan yang diharapkan adalah sebagaimana putusan yang berkepastian, bermanfaat dan berkeadilan. oleh sebab itu untuk menjawab masalah ini selain menggunakan *grand theoris* dan *midlle range theory* sebagaimana yang telah disinggung di atas, juga dengan *applied theory* teori Perubahan Penerapan Hukum dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oleh sebab itu untuk menjawab mengapa terjadi perubahan penerapan hukum putusan kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* di Pengadilan Agama maka berdasarkan hasil analisis dari pola penalaran hukum hakim menunjukkan bahwa hukum ketiga kasus tersebut dalam penerapannya sudah tidak memenuhi kepastian, kemanfaatan dan nilai keadilan, hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor tersebut sebagaimana dikemukakan berikut.

(1) Faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkup sosial suatu perkara (*social case*) yaitu: a) Faktor keadaan. Faktor ini berpengaruh pada perubahan putusan kasus *syiqaq*. Adapun keadaan yang dimaksud adalah terjadinya proses sosiologis terhadap pemaknaan konsep *syiqaq* dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Peradilan Agama yang menimbulkan multi tafsir di kalangan hakim. Barometer penerapan *syiqaq* harus didasarkan pada fakta hukum pemberian alasan perselisihan yang digunakan oleh para pihak ketika mengajukan perceraian. Kondisi dan ruang fakta hukum itu sendiri yang menuntut apakah terhadap perselisihan terus-menerus perlu diterapkan hukum *syiqaq* ataukah cukup hanya dengan menerapkan hukum gugatan cerai biasa. Hal-hal inilah yang memengaruhi terjadinya perubahan putusan kasus *syiqaq*. Dengan demikian, terdapat kaitan antara faktor keadaan dan perubahan putusan kasus *syiqaq*.

b) Faktor waktu. Faktor ini berpengaruh pada perubahan putusan kasus *khuluk*. Pengaruhnya tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui proses. Faktor waktu berkaitan langsung dengan masyarakat karena masyarakat hidup dalam ruang dan waktu. Perjalanan waktu pada prinsipnya berpengaruh pada perubahan nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat. Perubahan tersebut selanjutnya berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak hakim. Dalam memutuskan perkara *khuluk*, hakim tidak secara murni mengacu pada hukum yang sudah ada, tetapi mempertimbangkan aspek perubahan sosial tersebut. Pertimbangan itu yang nantinya ia gunakan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, terdapat kaitan antara faktor waktu dan perubahan putusan kasus *khuluk*.

c) Faktor motivasi. Faktor ini berpengaruh pada perubahan putusan kasus *li'an*. Adapun motivasi yang dimaksud adalah motivasi pada diri hakim. Dengan kata lain, ada hal-hal yang memotivasi hakim mengubah atau mengalihkan putusan

kasus *li'an* menjadi putusan gugatan perceraian biasa. Hal-hal tersebut antara lain pertimbangan psikologi dan sosial istri. Dari aspek psikologi, istri yang dituduh berzina akan mengalami tekanan jika kasus perceraian diputuskan secara *li'an*. Dari aspek sosial, istri yang dituduh berzina akan mendapat celaan dari masyarakat jika kasus perceraian diputuskan secara *li'an*. Pertimbangan inilah yang memotivasi hakim mengalihkan putusan kasus *li'an* menjadi putusan perceraian biasa. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara faktor motivasi dan perubahan putusan kasus *li'an*.

Selain faktor-faktor tersebut di atas legalitas formal yakni peraturan perundang-undangan perkawinan telah berperan aktif dalam perubahan kasus tersebut, dengan menggeser nilai-nilai fikih klasik ke arah nilai-nilai baru. Hal ini dapat dilihat melalui muatan alasan perceraian yang terdapat dalam aturan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang substansi perealisasiannya ditujukan untuk mencapai *maqashidussyari'ah* demi kepentingan umat manusia. Dalam hal ini yang dimaksud adalah perlindungan terhadap pihak istri maupun pihak suami di dalam rumah tangganya. Walaupun peraturan ini belum lengkap dan benar, perundang-undangan perkawinan yang sudah berlaku telah sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan masyarakat Islam.

- (2) Faktor eksternal, faktor ini dilihat dari hakim dalam melaksanakan tugasnya yang dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu; a) jaminan kebebasan peradilan/hakim. Dengan mendapatkan jaminan tersebut hakim dapat mengaktualisasikan ide keadilan dengan menegakkan dan memperhatikan fakta-fakta sosial (*living law*), sehingga hukum dapat memenuhi tujuannya, yaitu memberikan rasa kepastian, kemanfaatan dan keadilan pada masyarakat.

b). Profesionalisme hakim dan penghayatan etika profesi. profesionalisme hakim dan penghayatan etika profesi sangat penting bagi seorang hakim. Profesionalismenya ini akan memberikan kesadaran penuh bagi hakim untuk berijtihad dan mengerahkan segala keilmuan yang dimilikinya untuk melakukan reinterpretasi atau pengkajian serta penalaran yang maksimal terhadap masalah-masalah yang belum memiliki kepastian hukurnya. Dengan demikian hakim dapat menghasilkan pemikiran yang orisinal terhadap sumber-sumber ke-Islaman (*living law*). Dan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan dan perubahan sosial. Sementara itu, untuk penghayatan etika profesi, hakim diharapkan menguasai keilmuannya secara mendalam, memiliki kemampuan berpikir yuridis, dan memiliki kemahiran yuridis. Tujuannya, agar hakim dapat menghasilkan hukum baru, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam serta perkembangan zaman (kemodernan). Namun, untuk mengetahui apakah kedua faktor tersebut di atas telah ataupun belum maksimal dimiliki oleh hakim dilingkungan Peradilan Agama se-Provinsi Gorontalo, baiknya dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti merekomendasikan metode perubahan penerapan hukum terhadap kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an*, yaitu dengan menggunakan metode kausalitas-reaktualitas. Kausalitas adalah proses berfikir dengan menggunakan hukum sebab-akibat, baik secara formil, meteriil, maupun natural. Penalaran ini dipergunakan hakim dalam proses *konstatiring* dan *konstituiring*. Selanjutnya, dalam hal melakukan perubahan hukum, hakim dituntut harus reaktualitas. Artinya, dalam menghadapi penyelesaian kasus kongkret preskripsi *syar'i* (*syiqaq*, *khuluk*, *li'an*) hakim harus memerhatikan konteks sosialnya, sebab kontek sosial tersebut sarat dengan muatan waktu, ruang, keadaan, motivasi, dan tradisi masyarakat muslim. Dengan cara demikian, nilai-nilai *syar'i* dan nilai-nilai kemodernan akan terintegrasikan dalam putusan hakim.

## B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, peneliti menyarankan beberapa hal berikut.

1. Sebagai negara hukum, hendaknya hukum dijadikan sarana dalam pembentukan pola dan prilaku masyarakat. Saran ini dapat direalisasikan melalui perumusan hukum keluarga. Dalam perumusan hukum keluarga, perumusan sebaiknya memerhatikan budaya dan hukum yang ada di masyarakat. Saran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat tidak berada dalam ruang yang kosong dan statis, tetapi berada dalam ruang yang dipenuhi berbagai peristiwa dan selalu berkembang mengikuti arus zaman. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan ataupun putusan-putusan Pengadilan Agama diharapkan dapat membentuk kaidah-kaidah hukum baru sejalan dengan prinsip-prinsip *syari'at* Islam dengan tidak mengabaikan kondisi zaman.
2. Dalam hal memutuskan perkara perceraian, putusan hakim hendaknya tidak hanya sekadar memenuhi formalitas hukum atau sekadar memelihara ketertiban. Tetapi lebih dari itu, putusan hakim hendaknya memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hakim tidak hanya sekadar menjadi corong undang-undang. Oleh karena itu, putusan yang diambil sebaiknya mencerminkan kemampuannya dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Putusan yang baik adalah putusan yang disusun berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang lengkap, terperinci, jelas, dan akurat, yang diperolehnya melalui persidangan, serta termuat dalam Berita Acara Persidangan. Putusan hendaknya disusun secara runtut (sistematis) dengan bahasa yang baik dan benar, berisi argumentasi hukum yang tepat dan jelas, dan dapat mencerminkan profesionalismenya. Putusan yang demikian dapat memberikan kepuasan kepada para pihak. Jika itu terpenuhi, para pihak tidak akan melakukan upaya hukum lainnya yang penyelesaiannya menjadi berlarut-larut.
3. Hakim hendaknya melakukan reinterpretasi, reaktualisasi, dan



pembaruan pemahaman, terhadap preskripsi konsep hukum Islam sesuai dengan tuntutan konteksnya karena preskripsi hukum Islam sebagai jawaban solutif bagi problem aktual masyarakat muslim yang sering muncul seiring dengan perkembangan zaman. Apabila konteksnya mengalami perubahan, diperlukan pula reinterpretasi dan reaktualisasi yang bersifat kontekstual untuk melakukan pembaruan hukum Islam. Perubahan konteks sarat dengan muatan kondisi objektif dari fenomena sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dan semangat kemodernan dapat diintegrasikan dalam hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992.
- Abdullah, Sulaiman. *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam; Kajian Konsep Qias Imam Syafi'i*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Aburaera, Sukarno. dkk.. *Filsafat Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Abdullah, Abdul Gani. "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechshchepping*) Bagi Para Hakim", *Jurnal Ahkam*, Volume, 8 No. 2, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Algra, N. E. dkk.. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Saleh Adiwinata, dkk. Dari judul asli *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. Jakarta: Bimacipta, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Asal Mula Hukum*, terj. Simorangkir. dkk.. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Ali, Mohammad Daud. *Jurisprudensi Peradilan Agama dan Pengembangan Hukum Islam dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* Cet- 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum*

*Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.*

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesi, 2008

Abdillah, Mujiono. *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.

Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim*, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'rifah, tt.

\_\_\_\_\_. (ed.), *al-A'mal al-Kāmilah*. Cet. Ke-2. Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabyyah li an-Nasyr, 1972)

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Kewenangan)*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan, Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Cet-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

\_\_\_\_\_. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet-VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Al-Anṣārī, Zakaria. *Fath al- Wahhāb*, Juz. II. Mesir: Musthafii al-Bāb al-Halab, 1925.
- Al- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Syarh Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. IX. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t.
- Aṣ-Ṣiddiqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Al-Ma'arif, tt.
- Asikin, Zainal. dkk.. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asnawi, M. Natsir. "Permasalahan dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian Atas Alasan *Syiqaq* di Pengadilan Agama dengan Acara Verstek", <http://www.badilag.net/artikel>, 2012.
- . *Putusan Hakim; Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Asasriwarni. "Studi tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam (Kasus wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 1997)". Disertasi Program sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press. 2013.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme, Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Al-Baihaqi. *as-Sunan al-Kubra*, Juz.7. Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cet-1, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Bisri, Ahmad Mufid. Divergensi Perselisihan dan Pertengkar sebagai Alasan Perceraian (*Sebuah Observasi Kronologis-Hipotesis terhadap Munculnya Terminologi Syiqaq di Peradilan Agama*) <http://www.badilag.net/artikel>, Oktober 2013.
- Ad-Dusuqi. *Hasyiah ad—Dasuqi 'ala as-Sarh al-Kabir*. Juz. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Efendi M, Satria. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cet-1, Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2004.
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2013
- El Islamiy, Erfani. "Syiqaq Tak Harus Berdharar" (Sebuah Rekonstruksi-Etimologis Makna Syiqaq sebagai Alasan Perceraian di Peradilan Agama), <http://www.badilag.net/artikel>, Oktober 2013.
- Fazar, Nur Dewata. Dkk., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fuadi, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hakeem, Ali Hoesien. dkk.. *Membela Perempuan*. Jakarta: Alhuda, 2005.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*

*Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: Mandar Maju, 2007.

Al-Haitami, Ibn Hajar. *Tuḥfah al-Muhtāj*, Juz. VII. Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubro, 1983.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Cet-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

\_\_\_\_\_, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). *Bandung: Balai Pustaka, 1990.*

Harahap, Krisna. *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif.* Bandung: Grafiti, 2009.

Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks.* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Ihroni T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Instruksi Presiden Nomor. 1. Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ibnu Katsir. *al-Bidāyah wa an-Nihayāh.* Beirut: Maktabah al-‘Ashriyah, t.th.

Ibnu Rusyd, Abī al-Walīd Muhammad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihayāt al- Muqtasid.* Beirut: Dār al-Jai1, 1979.

\_\_\_\_\_, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz. II, Beirut: Dār al-Fikr, 1977

al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwaqī'īn*, Jilid., I, II, III, IV, Beirut: Dar al-Jail, 1973.

\_\_\_\_\_. *Zād al-Ma'ād.* Jilid IV Beirut: Musthafā al-Bāb al-Halab, 1970.

- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Peradilan Islam* terj. Adnan Qohar dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- al-Jazīrī, 'Abd. ar-Raḥmān. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Mesir: Maktabah Tijāriyyah al-Kubrā, 1969.
- Kamil, Ahmad. dkk.. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Ke arah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam Sema dan Perma*. Jakarta: Kencana, 2008.
- al-Khumasī, Ahmad. *at-Ta'liq Alā Qānūn al-Aḥwāl asy-Syakhsyiyah*, Juz. I. ttp: Dār an-Naṣr al-Ma'rifah, tt.
- Lamkuta, A. Manan Chik. "Hakim di Lingkungan Peradilan Agama". Artikel dalam Harian Pelita, terbitan hari Rabu tanggal 7 Maret 1984.
- Loude, John Z. *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan fakta*. Jakarta: Bina Aksar, 1985.
- Lev, Daniel S. *Islamic Court in Indonesia A Study in The Politikal Bases of Legal Institutional*; Alih Bahasa Zainal Ahmad Noeh , *Peradilan Agama Islam di Indonesia* . Jakarta: Intermasa, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, Alih Bahasa, Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Lubis, Sulaikin. dkk.. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana , 2005.
- Lukito, Ratno. *Hukum Saklar dan Hukum Sekuler Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.



Al-Mandhūr, Jamāl al-Dīn Muhammad Ibn Mukarram. *al-Ansāri, Lisān al-Arabi* Juz.VIII, Mesir: Dār Misrīya, t.t.

Mahfud M. D, Mohammad. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.*, Yogyakarta: UII Pres, 1993.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam sistem peradilan Islam*. Cet-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

\_\_\_\_\_. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.

\_\_\_\_\_. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

\_\_\_\_\_. *Syiqaq dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. Mimbar Hukum, No. 31 Tahun VIII, 1997.

Manan, Bagir. "Beberapa Catatan Tentang Penafsiran", dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan* Tahun XXIV No. 285 Edisi Agustus 2009; Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009.

MA-RI Dirjen Badan Peradilan Agama. *Buku II: "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama"*. Edisi revisi 2010, Jakarta, 2010.

Marzuki, Wismar 'Ain. *Orientasi Konsep-Konsep Dasar Dan Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dalam Sulaikin Lubis, dkk., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsīr al-Maraghi, Bab I al-Halabi*.

Cairo: tt.p, t.t.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

\_\_\_\_\_. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Cet-7, Yogyakarta: Liberty, 2007.

\_\_\_\_\_. dkk.. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bekerjasama dengan: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foudation, 1993.

*Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No. 65 Tahun.XIV November-Desember, Jakarta: Al-Hikma dan DITBINPERA Islam, 2004.

\_\_\_\_\_. *Aktualisasi Hukum Islam*, No. 58 Tahun. XII Juli-Agustus, Jakarta: Al-Hikma dan DITBINPERA Islam, 2002.

\_\_\_\_\_, *Aktualisasi Hukum Islam*, No. 56 Tahun. XIII Januari-Februari, Jakarta: Al-Hikma dan DITBINPERA Islam, 2002.

Muallim, Amir. "Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan PTA Semarang 1991-1997)". Seri Disertasi, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet-I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet-2, Jakarta: Kencana, 2003.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Muchsin. *Iktisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006.

Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Muctar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mugniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*. Beirut: Dar al-Jawad, t.th

\_\_\_\_\_, terjm. cet. ke-2. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Baristama, 1996.

Mudzakir. *Himpunan Yurisprudensi Hukum Islam, dalam Putusan Mahkamah Agung. RI Tingkat Peninjauan Kembali No:28.PKIAG/1995,tgl16 Oktober,1996*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999.

Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab, Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984

Ibn Najim, Zainuddin. *al-Bahr al-Raiq*, Juz. V, Mesir: al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra, t.t

Nashir W, J. *The Status of women under Islamic law*, London: Graham and trotman, 1990.

Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012

Nurrudin, Amiur. dkk.. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 111974 Sampai KH.I* Jakarta: Kencana, 2006.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama

Buku II (Edisi Revisi 2010) Mahkamah Agung, Dirjen Badilag, 2010.

Puwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Pound, Roscoe. "Do We Need A Philoshopy Of Law?" Dalam: The Association Of The Bar Of The City New York, *ed.*, *Jurisprudence in Action Anthology*. New York: Beker, Voorhis & Co, 1953.

Al-Qaradhawi, Yusuf. terj., Arif Munandar Riswanto *dkk.* *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*, Jakarta: Al-Kautsar, 2009.

Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.

\_\_\_\_\_. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

\_\_\_\_\_. *Ilmu Hukum*. Cet-VI. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

\_\_\_\_\_. *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Rasjidi, Lili. *Hukum sebagai suatu system*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manār*. Cairo: Dar al-firk al-Arabi, 1987.

Ritonga, Iskandar. *Hak-hak Wanita Dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1995*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta: 2003.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif*

*Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Sabrie, Zuffran. (ed.). *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.

As-Ṣābunī. ʿAlī. *Rawāʿi al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikri, 1989.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-VIII. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987

Salman, Otje. dkk.. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Cet. Ke-3. Bandung: Refika Aditama, 2007.

As-Sarakhsī, Syam al-Dīn. *al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1989

Sarmin. "Buletin Hukum dan Peradilan" No. 11, Ditbinbapera, 2000.

As-Syāfī. *al-Umm*. edisi al-Muzni, Juz.V. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t

Scanzoni, Letha Dawson. dkk. *Men, Women and Change: A Sociology Of Marriage And Family*. New York: McGraw Hill Book Company, 1981.

Schacht, J. *An Introduction to Islamic Law*, USA; Oxford University Press, 1964.

Seri Perundang-Undangan *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Singarimbun, Masri. terj. Arif Munandar Riswanto dkk, *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: LP3ES, 1989.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: al-Fath al-I'lam al'Arabi, 1998.

Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Shomad, Abd. *Hukum Islam, Fenomena Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974, tentang Perkawinan*, cet.2. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Soekamto, Soejono. dkk.. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Hukum*. Cet-II. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

\_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Subekti, dkk., *Kamus Hukum*. Cet-12. Jakarta: Pradya Paramita, 1996.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2006.

- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Pelaksanaanya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Susanto, Noto. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1963.
- Supriadi, Dedi. dkk., *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Sutioso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Suteki. *Desain Hukum Diruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- As-Suyutī, Jalāluddīn. *Tafsīr Jalālain bi Hasiyah al-Ṣāwī*, Juz. II. Dar al-Kutub: al- Arabiyah, 1989.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010
- Syamsuddin, Amir. "Penemuan Hukum Ataupun Perilaku Chaos?". Dalam Opini Harian *Kompas*, Sabtu 5 Januari, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Tanya, Bernard L. dkk.. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- At-Tanūkhī, Muḥammad Ṣaḥnūn bin Saʿīd. *al-Mudawwanah al-Kubrā* Juz. III. Beirūt: Dār Ṣādir, 1323.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.

At-Thabari, Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr. *Jāmi al-Bayān Fi Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*. Indonesia: Syirkatu Iqamatuddin, 1988.

Tihami, H.M.A. dkk.. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.

Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradya Paramita, 1978.

Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

Umairah, dan Qalyubi. *Syarḥ Minhāj al-Ṭālibīn*, T.tp:t.p., 1956.



Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J Milton Cowan (ed.). London: Macdonald & Evans Ltd, 1960.

Wibowo, Basuki Rekso. "Pembaruan Hukum Yang Berwajah Keadilan" dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 285 Edisi Desember, 2011.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Mugashshal fi Ahkamil Mar-ah Wal Baitil Muslim Fisy-Syari 'atil Islamiyah*, jild VIII. Beirut: Muassasah Risalah, t.tt.

Zahrah, Muhammad Abu. *al-Aḥwāl asy-Syakhsyiyah*. Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, 1950.

Zen, Satria Effendi M. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz. 9. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.



## LAMPIRAN

### DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

No.	Nama	Jabatan
1	Mohamad Yamin	Ketua Pengadilan Agama Gorontalo
2	Saerodji	Wakil ketua Pengadilan Agama Limboto
3	Nurhudayah	Ketua Pengadilan Agama Tilamuta
4	Burhanudin Mokodompit	Hakim Pengadilan Agama Gorontalo
5	Mukasipa	Hakim Pengadilan Agama Limboto
6	Nur Rohman	Hakim Pengadilan Agama Gorontalo
7	Mohamad H. Daud	Hakim Pengadilan Agama Gorontalo
8	Mawardi	Hakim Pengadilan Agama Tilamuta
9	Muh. Taufik Hasan Ngadi	Panitra Muda Pengadilan Tinggi Agama



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Titin Samsudin, S.Ag., M.HI.  
 Tempat/tgl.lahir : Gorontalo, 17 Maret 1972  
 NIP/NIK : 197203172000032003  
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/d)  
 Jabatan Fungsional : Lektor  
 Alamat Rumah : Jl. Taman Hiburan I, Kelurahan  
 Wonggaditi Barat, Kota Gorontalo  
 Alamat Kantor : Jl. Gelatik No. 1 Kelurahan  
 Heledulaa, Kota Gorontalo  
 Email : nurulhubbi@gmail.com  
 No/HP : (0435) 8522011 / 085240818534  
 Nama Ayah : Syamsuddin S.B Iyonu  
 Nama Ibu : Rusni Musa  
 Nama Suami : Rizan Adam, M.HI.  
 Nama Anak : 1. Marha Fathu Masthurah  
 2. Nurul Tazkiyah Adam  
 3. M. Fakhrusyamil Adam

### B. Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal
  - a. SD, Tahun 1985
  - b. SMP, Tahun 1988
  - c. SMA, Tahun 1991
  - d. S1 (Fakultas Syari'ah. IAIN Alauddin Ujung Pandang)  
Tahun 1995
  - e. S2 (Kosentrasi Hukum Islam. IAIN Alauddin Makassar)  
Tahun
2. Pendidikan Non Formal/Pelatihan Yang Pernah Di Ikuti;
  - a. Akta IV Tarbiyah/PAI STAIN Sultan Amai Gorontalo,  
Tahun 1998
  - b. Pelatihan Penelitian Penyelenggara P3M STAIN Sultan  
Amai Gorontalo, Tahun 2002

- c. Tenaga Dosen Departemen Agama Penyelenggara Balai Diklat Teknis Keagamaan Manado, Tahun 2003
- d. Resdesining Curriculum Penyelenggara STAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2005
- e. Desain Content Pembelajaran Dan Pengolahan Nilai Dengan Digital Penyelenggara IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tahun 2005
- f. Higher Education Evalution Design IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tahun 2006
- g. Desain Bahan Ajar Mata Kuliah Berbasis Kompetensi Penyelenggara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Tahun 2007.
- h. Pelatihan Applied Approach (AA) IAIN Sultan Amai Penyelenggara Gorontalo, Tahun 2008

#### C. Riwayat Pekerjaan

- 1. Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2000 s/d sekarang
- 2. Sekretaris Jurusan Syari'ah IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2002/2004
- 3. Ketua Jurusan Ekonomi Perbankan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2004/2006
- 4. Sekretaris Senat IAIN Sultan Amai Gorontalo 2015 s/d sekarang

#### D. Karya Ilmiah

- 1. Penelitian
  - a. Perkawinan Tidak Tercatat Penelitian Kelompok Tahun 2003
  - b. Kecenderungan Penelitian Dosen Stain Sultan Amai Gorontalo Penelitian Kelompok Tahun 2004
  - c. Fiqh Pembebasan Wanita, Studi Atas Pemikiran Ashgar Ali Enginer Peneliti Individu Tahun 2005
  - d. Studi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Di Kota Gorontalo Peneliti Individu Tahun 2009

## 2. Artikel

- a. Membangun Sikap Toleran Dalam Perspektif Islam, Penerbit Amai Press 2005
- b. Kebolehan Mut'ah Dalam Perspektif Syi'ah (Studi Tentang Dasar dan Metode Istibath Hukum), penerbit Amai Press 2005
- c. Periodisasi Perkembangan Pemikiran Dalam hukum Islam, Penerbit Amai Press 2006
- d. Birokrasi sebagai Lahan Korupsi, Penerbit Amai Press 2007
- e. *Marital Rape* Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penerbit Amai Press 20013
- f. Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum. Penerbit Amai Press 2014

